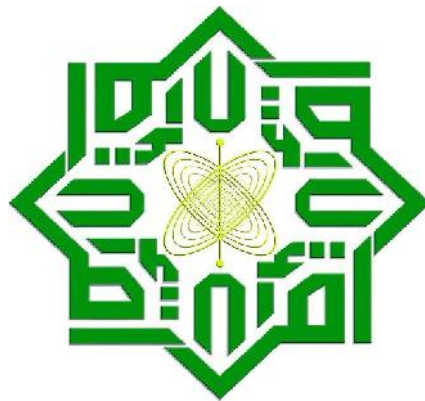


PEMIKIRAN TAQIYDDIN AN-NABHANI TENTANG POLITIK EKONOMI ISLAM

S K R I P S I

Diajukan Sebagai Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
Di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH :

HERMAN
10725000206

PROGRAM S1

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

ABSTRAK

Penelitian berjudul “Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang Politik Ekonomi Islam”. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*) yakni menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan dari pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang politik ekonomi Islam. Adapun mendasari penulis, mengkaji pemikiran Taqiyuddin An-Nabhni khusus dalam masalah politik ekonomi Islam, karena keunikan pemikirannya dalam bidang ekonomi. Kemudian, dalam membahas masalah ekonomi Islam, Taqiyuddin An-Nabhani lebih menekankan pada aspek pilosofis dan pelaksanaannya dalam bingkai Negara. Selanjutnya, Taqiyuddin An-Nabhani dalam membahas tentang politik ekonomi Islam, mengkritisi pemikiran, konsep dan teori ekonomi yang ada di luar Islamm, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Dengan demikian permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang politik ekonomi Islam. Bagaimana analisis Ekonomi Islam terhadap pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang politik ekonomi Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri terbagi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari riset perpustakaan (*library reseach*) yaitu buku tentang politik ekonomi Islam menurut pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari riset perpustakaan (*library reseach*) terhadap buku pokok permasalahan yang dikaji yaitu tentang Politik Ekonomi Islam. Berbagai data yang dibutuhkan diperoleh dengan cara: 1) Mengumpulkan buku baik primer maupun skunder yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. 2) Setelah buku-buku terkumpul kemudian ditelaah serta mencatat materi-materi yang umum yang ada hubungannya dengan penelitian, dan 3) Catatan terhadap materi-materi tersebut selanjutnya diklasifikasikan kedalam bagian-bagian atau konsep-konsep yang sesuai dengan masalah penelitian. Kemudian data-data sudah terkumpul melalui tahapan-tahapan kupulan data diatas selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tehknik analisis isi (konten analisis) yaitu mempelajari pesan-pesan yang ada diberbagai literatur mulai dari kosa kata, pola kalimat dan latar belakang situasi.

Kemudian dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yaitu sistem politik ekonomi Islam menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani merupakan sistem politik yang unik dan khas dibandingkan dengan sistem ekonomi selain Islam. Dimana dalam sistem politik ekonominya, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani memaparkan tentang peran Negara begitu penting dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok (primer) setiap warga Negara tanpa terkecuali. Hal ini didasari bahwa pandangan politik ekonomi Islam, dalam mengukur terpenuhi atau tidaknya kebutuhan pokok seseorang dengan mengukur secara individu bukan secara kolektif. Kemudian, sistem politik ekonomi Islam memberikan kesempatan kepada individu untuk meraih kebutuhan sekunder, dan tersier sesuai

kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki. Dengan cara mewajibkan laki-laki yang baligh untuk bekerja, bila dengan bekerja juga tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka dituntut kepada kerabat dan ahli warisnya. Namun, bila keduanya juga tidak mampu, maka Negara menjamin dengan mengambil dari Baitul Maal. Dengan demikian, tampaklah bahwa politik ekonomi Islam telah dibangun dengan berpijak pada asas pemenuhan kebutuhan setiap orang sebagai individu yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu, serta asas bekerja untuk mendapatkan kekayaan dalam rangka memenuhi apa saja yang bisa memuaskan kebutuhan. Karena itu, politik ekonomi Islam tersebut sebenarnya berdiri di atas satu konsep, yaitu menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan hukum syari'ah yang diterapkan oleh setiap orang dengan dorongan ketakwaan kepada Allah SWT serta dilaksanakan oleh Negara, melalui pembinaan dan pengundang-undangan hukum syariah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang memberikan taufik dan hidayah-Nya serta nikmat yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad saw, yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa ummatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang.

Dengan izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Politik Ekonomi Islam”**. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap strata satu (S1) pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Pekanbaru.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik itu secara moril maupun materil. Karena itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua tersayang yang telah memberikan semangat, dorongan serta do'a untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir Karim selaku Rektor UIN Suska Riau beserta staf-stafnya.
3. Yang terhormat Bapak DR. Akbarizan, MA. M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum beserta Pembantu Dekan I, II, III dan staf atau karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Suska Riau.
4. Yang terhormat Ketua Jurusan Bapak Mawardi, S.Ag. M.Si dan Sekretaris Jurusan Bapak Darmawan Tia Indrajaya, MA yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Terima kasih kepada Bapak DR. Heri Sunandar, M.CI, selaku pembimbing skripsi, yang telah membimbing dan mengarahkan skripsi penulis.
6. Terima kasih kepada Bapak Hendri Sayuti, MA selaku Penasehat Akademis
7. Seluruh keluarga besar penulis.
8. Tidak lupa kepada teman-teman seperjuangan khusus Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau

Semoga amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dari Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya Robbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 13 Maret 2013
Penulis

HERMAN
NIM. 10725000206

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
NOTA PEMBIMBING	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Tinjauan Kepustakaan.....	7
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Pembahasan	11
 BAB II BIOGRAFI TAQIYUDDIN AN-NABHANI	
A. Sejarah Singkat Taqiyuddin An-Nabhani	12
B. Pendidikan Taqiyuddin An-Nabhani.....	14
C. Karya-Karya yang Ditinggalkan	17
 BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG POLITIK EKONOMI ISLAM	
A. Pengertian Politik Ekonomi Islam	21
B. Tujuan Politik Ekonomi Islam	27
1. Jaminan pemenuhan kebutuhan	28
2. Keadilan dalam peran serta ekonomi	30
3. Stabilitas ekonomi dan pertumbuhan	31
C. Ruang Lingkup Politik Ekonomi Islam	33
1. Objek Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	34
2. Strategi Politik Ekonomi Islam	38
D. Peran Negara dalam Perekonomian	43
1. Peran Negara dalam Perekonomian Menurut Sistem Kapitalisme.....	43
2. Peran Negara dalam Perekonomian Menurut Sistem Sosialisme-Komunisme	45
3. Peran Negara dalam Perekonomian Menurut Sistem Islam	46

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Politik Ekonomi Islam	53
1. Pengertian.....	53
2. Tujuan Politik Ekonomi Islam	56
a. Standarisasi kesejahteraan.....	57
b. Peluang dan kesempatan yang dimiliki	58
c. Target dan sasaran	58
d. Tolak ukur perbuatan	58
3. Mekanisme Pemenuhan Kebutuhan	59
4. Konsep Kepemilikan	63
B. Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Politik Ekonomi Islam.....	68
1. Memecahkan masalah utama yang dihadapi setiap orang.....	71
2. Mendorong setiap individu untuk meningkatkan taraf hidup	74
3. Mengupayakan kemakmuran	76

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	77
B. Saran-Saran	78

DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca keruntuhan institusi Islam Khilafah *Rasyidah ala Min Hajj al-Nubuwwah* di Turki melalui tangan Mustafa Kemal pada tanggal 3 Maret 1924, sehingga salah satu cabang syariah terpenting yang saat ini banyak dilupakan adalah syariah ekonomi, terutama terkait dengan ekonomi makro. Syariah Islam memandang perkara ekonomi menjadi 2 bagian, yaitu ilmu ekonomi dan sistem ekonomi.¹ *Pertama: ilmu ekonomi*; berhubungan dengan soal bagaimana suatu barang atau jasa diproduksi, misalnya teknik industri, manajemen atau pengembangan sumberdaya baru. Islam tidak mengatur secara khusus tentang ilmu ekonomi. *Kedua: sistem ekonomi*; berhubungan dengan pengurusan soal pemuasan kebutuhan dasar tiap individu di dalam masyarakat serta upaya mewujudkan kemakmurannya. Inilah obyek dari sistem ekonomi Islam.²

Pilar Sistem Ekonomi Islam (SEI) meliputi: (1) konsep kepemilikan; (2) pengelolaan kepemilikan; (3) distribusi kekayaan di antara individu. Islam mengatur sedemikian rupa kepemilikan yang memungkinkan individu untuk memuaskan kebutuhannya seraya tetap menjaga hak-hak masyarakat.³ Islam membagi kepemilikan menjadi 3: milik pribadi; milik umum; milik negara. Adapun kepemilikan umum (*collective property*) dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

¹ Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: al-Azhar Press, 2009), h. 13-14.

² *Ibid.*

³ Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizhamu al-Iqtishodi fi al-Islam*, Diterjemahkan oleh Hafiz Abdurrahman, dengan judul *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2010), h. 28.

1. Fasilitas umum; meliputi apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Jika barang tersebut tidak ada di tengah masyarakat akan menyebabkan kesulitan dan dapat menimbulkan persengketaan dalam mendapatkannya.
2. Barang tambang yang tidak terbatas. Adapun barang tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu barang tambang yang terbatas jumlahnya, dan barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya. Barang tambang yang terbatas jumlahnya dapat dimiliki oleh individu, sementara barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya tidak dapat dimiliki oleh individu. Jenis barang tambang ini haram dimiliki secara pribadi, seperti; garam, batu mulia, emas, perak, besi tembaga, timah dan sejenisnya.
3. Benda benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh pribadi; meliputi jalan, sungai, laut, danau, tanah tanah umum, teluk, selat, dan sebagainya.⁴

Pengelolaan milik umum dilakukan oleh negara sebagai wakil umat. Hasilnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Dusahakan semaksimal mungkin dalam pengelolaannya tidak menimbulkan kerusakan baik lingkungan, ekosistem maupun sosial.

Pengelolaan kepemilikan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah. Islam mendorong warga Negara *Khilafah*, baik lelaki maupun wanita, baik Muslim maupun kafir *zhimmi* (*ahlu al-Zhimmah*), untuk mengelola kepemilikannya, mengejar keuntungan tanpa hambatan dan memuaskan kebutuhan mereka; tanpa harus mengakibatkan eksploitasi ataupun korupsi

⁴ Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *op.cit*, h. 143-145.

yang ditimbulkan dari aktivitas mereka. Islam juga mendorong pemberian sedekah, hibah, pinjaman tanpa riba dan sebagainya. Sebaliknya, Islam melarang penumpukan kekayaan, pemborosan atau pembelanjaan untuk mengejar hal-hal yang haram.

Distribusi kekayaan dan kemakmuran di dalam masyarakat adalah faktor kritis dalam menentukan kecukupan sumberdaya bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itulah Islam menjadikan distribusi barang dan atau jasa sebagai problem utama ekonomi. Bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, negara (*Khilafah*) mengurus mereka dengan kekayaan yang terkumpulkan dari harta milik umum, harta milik negara dan zakat yang dibayarkan oleh rakyat. Berdasarkan paradigma ini Islam telah menetapkan politik ekonomi dan mekanisme ekonomi untuk menjamin kesejahteraan umat manusia, sekaligus menjamin kemajuan serta pertumbuhan yang berkeadilan yang disertai dengan pemerataan.

Secara umum politik ekonomi adalah sebagai berikut:

هِيَ الْهَدَفُ الَّذِي تَرْمَى إِلَيْهِ الْأَحْكَامُ الَّتِي تُعَالِجُ تَذْيِيرُ أُمُورِ الْإِنْسَانِ

Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum yang dipergunakan untuk memecahkan mekanisme pengaturan berbagai urusan manusia⁵

Dari pengertian secara umum di atas dapat dipahami bahwa politik ekonomi merupakan strategi yang dilakukan dalam rangka memecahkan berbagai persoalan yang hidup yang dihadapi manusia dengan cara mengatur berbagai urusan (kebutuhan) tersebut.

⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizhamu al-Iqtishodi fi al-Islam*, (Beirut: Darul Ummah, 1425 H/ 2004 M), h. 60.

Pengertian politik ekonomi secara umum di atas, senada dengan pengertian yang dirumuskan oleh Abdurrahman al-Maliki, adalah target yang menjadi sasaran hukum-hukum yang menangani pengaturan perkara-perkara manusia.⁶ Hal yang sama juga diungkapkan oleh Taqiyuddin An-Nabhani, sebagai berikut:

هِيَ ضَمَانُ تَحْقِيقِ الْإِشْبَاعِ لِجَمِيعِ الْحَاجَاتِ الْأَسَاسِيَّةِ لِكُلِّ فَرْدٍ إِشْبَاعًا كُلِّيًّا، وَتَمَكِينُهُ مِنْ إِشْبَاعِ الْحَاجَاتِ الْكَمَالِيَّةِ بِقَدَرٍ مَا يَسْتَطِيعُ، بِإِعْتِبَارِهِ يَعِيشُ فِي مُجْتَمَعٍ مُعَيَّنٍ، لَهُ طَرَاثُ خَاصٌّ مِنَ الْعَيْشِ، فَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى كُلِّ فَرْدٍ بِعَيْنِهِ، لَا إِلَى مَجْمُوعِ الْأَفْرَادِ الَّذِينَ يَعِيشُونَ فِي الْبِلَادِ

Menjamin terealisasinya pemenuhan semua kebutuhan primer (basic needs) setiap orang secara menyeluruh, berikut kemungkinan dirinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya, sesuai dengan kadar kesanggupannya sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup (life style) tertentu.⁷

Taqiyuddin An-Nabhani adalah pendiri Hizbuttahrir; yang merupakan sebuah partai politik berskala internasional, dengan terdapat lebih kurang 57 kantor di berbagai negara di dunia. Taqiyuddin An-Nabhani merupakan seorang pemikir yang kritis terhadap kondisi fakta yang ada.⁸ Dengan demikian, dalam bidang ekonomi corak pemikirannya mengkritisi konsep atau akar pemikiran ekonomi diluar Islam, yaitu kapitalisme dan sosialisme.

Dalam membahas politik ekonomi Islam, terdapat beberapa pokok pemikiran dari Taqiyuddin An-Nabhani, di antaranya:

⁶ Abdurrahman al-Maliki, *as-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsala* (terj), Ibnu Sholah dengan judul *Politik Ekonomi Islam*, (Jawa Timur: al-Izzah, 2001), h. 37.

⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *al-Nizhaamu al-Iqtishodi fi al-Islam*, loc.cit.

⁸ Herry Muhammad dkk, *Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h.302.

1. Memecahkan mekanisme pengaturan berbagai kebutuhan manusia dengan menjamin terpenuhinya hak hidup (kebutuhan pokok) setiap orang (berupa sandang, pangan, dan papan).
2. Memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memperoleh kemakmuran (berupa kebutuhan sekunder dan tersier).⁹
3. Mengatur sebab-sebab kepemilikan serta akad-akad (transaksi-transaksi) yang digunakan untuk melangsungkan pertukaran hak milik (property).¹⁰
4. Menjadikan falsafah ekonominya berpijak pada upaya untuk menjalankan aktivitas perekonomian dengan berpegang pada perintah dan larangan Allah SWT, yang didasarkan pada kesadaran adanya hubungan dengan-Nya.¹¹

Dari beberapa pemikiran pokok di atas, Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan bahwa dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup setiap orang, dimana dalam mengukur terpenuhinya kebutuhan tersebut dengan cara memandang setiap orang secara pribadi, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah Negara. Selanjutnya, dalam Politik Ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah Negara semata, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya setiap orang untuk menikmati kehidupan tersebut.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut ke dalam bentuk skripsi dengan judul:

“PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG POLITIK EKONOMI ISLAM”.

⁹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam* (terj), *op.cit*, h. 70-71.

¹⁰ *Ibid*, h. 75.

¹¹ *Ibid*, h. 79.

¹² *Ibid*, h. 69.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilaksanakan lebih terarah dan sesuai dengan maksud yang diinginkan, sehingga perlunya dilakukan batasan masalah dalam penelitian ini, tentang konsep politik ekonomi Islam dan jaminan negara terhadap terpenuhinya berbagai kebutuhan hidup manusia menurut pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, sehingga dirumuskan beberapa rumusan masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang Politik Ekonomi Islam?
2. Bagaimana analisis Ekonomi Islam terhadap Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang politik Ekonomi Islam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan, adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang Politik Ekonomi Islam.
2. Untuk mengetahui analisis ekonomi Islam terhadap pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang politik Ekonomi Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Mengembangkan dan mengaplikasikan disiplin ilmu yang dimiliki selama proses perkuliahan dalam bentuk penelitian.

2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.
3. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sya) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Tinjauan Kepustakaan

Politik Ekonomi Islam (PEI) merupakan suatu strategi yang dilakukan dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok (*basec*) setiap orang secara menyeluruh, dan memberikan peluang serta kesempatan kepada individu untuk memperoleh kebutuhan sekunder dan tersier sesuai kesanggupan yang dimiliki.

Menurut Abdul Qadim Zallum, kata “politik” dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah “*siyasah*”, mengandung makna “*mengatur urusan umat, baik secara dalam maupun luar Negeri*”.¹³ Adapun kata ekonomi mengandung pengertian “hemat dan penuh perhitungan”. Pengertian ini dirumuskan dengan mengkomparasikan antara pengertian ekonomi dengan istilah dalam bahasa Arab yang menggunakan kata “*Iqtishad*”.¹⁴

Sementara kata Islam mengandung makna selamat. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Muhammad SAW yang mengatur hubungan manusia dengan pencipta,

¹³ Abdul Qadim Zallum, *Political Thought (Afkar Siyasiyah)* (terj), Diterjemahkan Abu Faiz, dengan judul *Pemikiran Politik Islam*, (Bangil: Al-Izzah, 2004), h. 11.

¹⁴ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru, Alaf Riau, 2007), h. 2.

dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan sesama.¹⁵ Hubungan manusia dengan pencipta, mengatur dalam aspek aqidah dan ibadah. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri, mengatur dalam aspek, makan, minum, berpakaian dan akhlak. Sementara hubungan manusia dengan sesama mengatur dalam aspek muamalah dan sanksi-sanksi.¹⁶

Dari pengertian bahasa dari penggalan kata “Politik Ekonomi Islam”, menurut banyak ahli atau pemikir tentang pengertian istilah Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhan, Politik Ekonomi Islam adalah *menjamin terealisasinya pemenuhan semua kebutuhan primer (basic needs) setiap orang secara menyeluruh, berikut kemungkinan dirinya untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya, sesuai dengan kadar kesanggupannya sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup (life style) tertentu.*¹⁷

Aburrahman Al-Maliki, Politik Ekonomi, adalah target yang menjadi sasaran hukum-hukum yang menangani pengaturan perkara-perkara manusia. Sementara Politik Ekonomi dalam Islam adalah jaminan terpenuhinya semua kebutuhan primer (*al-hajat al-asasiyah/basic need*) tiap-tiap individu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan luks (*al-hajat al-kamaliyah*)-nya sesuai kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat tertentu yang memiliki gaya hidup yang khas.¹⁸

¹⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizhaamu Al-Islaam*, Diterjemahkan oleh Abu Amin, dkk dengan judul *Peraturan Hidup Dalam Islam*, (Bogor: Al-Izzah, 2005), h. 181.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *al-Nizhaamu al-Iqtishodi fi al-Islam*, *loc.cit.*

¹⁸ Abdurrahman al-Maliki, *loc. cit.*

Dari pengertian di atas, juga memiliki makna yang sama dengan pengertian ekonomi menurut Veithzal Rivai dan Andi Buchari, yaitu “*politik ekonomi*” adalah tujuan yang akan dicapai oleh kaedah-kaedah hukum yang dipakai untuk berlakunya suatu mekanisme pengaturan kehidupan masyarakat. Sementara “*politik ekonomi Islam*” adalah "suatu jaminan untuk tercapainya pemenuhan semua kebutuhan hidup pokok (*basic needs*) tiap orang secara keseluruhan tanpa mengabaikan kemungkinan seseorang dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar potensi yang dimilikinya sebagai seorang individu yang hidup di tengah komunitas manusia.¹⁹

Pengertian di atas, terdapat beberapa point penting, yaitu: (1) Adanya jaminan pemenuhan kebutuhan pokok, (2) Memberikan kemungkinan bagi tiap individu tanpa terkecuali untuk memperoleh kebutuhan sekunder dan tersier. Selanjutnya, dari beberapa point penting pengertian “*politik ekonomi Islam*” di atas, hal ini peran utama dari negara dalam masalah tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicari cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan bahwa

¹⁹ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Mengislamkan Ekonomi Masyarakat dan Memasyarakatkan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 38.

metodologi penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumennya adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data-data itu. Adapun metodologi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek pembahasan yang peneliti teliti.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Taqiyuddin an-Nabhani. Sementara objek dalam penelitian ini adalah pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang Politik Ekonomi Islam.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari riset perpustakaan (*library reseach*) yaitu buku النظام الإقتصادي في الإسلام tentang politik ekonomi Islam menurut pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari riset perpustakaan (*library reseach*) terhadap buku pokok permasalahan yang dikaji yaitu tentang Politik Ekonomi Islam.

4. Metode Pengumpulan Data Penelitian

- a. Mengumpulkan buku baik primer maupun skunder yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

- b. Setelah buku-buku terkumpul kemudian ditelaah serta mencatat materi-materi yang umum yang ada hubungannya dengan penelitian
- c. Catatan terhadap materi-materi tersebut selanjutnya diklasifikasikan kedalam bagian-bagian atau konsep-konsep yang sesuai dengan masalah penelitian.

5. Metode Analisis Data Penelitian

Data-data sudah terkumpul melalui tahapan-tahapan kupulan data diatas selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis isi (konten analisis) yaitu mempelajari pesan-pesan yang ada diberbagai literatur mulai dari kosa kata, pola kalimat dan latar belakang situasi.

6. Metode Penulisan

- a. Metode Deduktif; adalah metode dengan mengumpulkan kaidah-kaidah yang bersifat umum untuk diuraikan dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Deskriptif Analitik adalah suatu cara mengumpulkan data yang dianggap berhubungan dengan permasalahan yang diteliti kemudian dilukiskan secara sistematis.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mengklasifikasikan permasalahan ini ke dalam lima bab penelitian, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan pembahasan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

- Bab II : Bibliografi Taqiyuddin An-Nabhani.** Dalam bab ini menguraikan pembahasan tentang Kelahiran Taqiyuddin an-Nabhani, Pendidikan dan Perjuangan Taqiyuddin an-Nabhani, dan Karya-Karya yang dihasilkan oleh Taqiyuddin an-Nabhani
- Bab III : Tinjauan Umum Tentang Politik Ekonomi Islam.** Dalam bab ini akan menguraikan tentang pengertian politik ekonomi Islam, Tujuan politik ekonomi Islam, dan Ruang Lingkup Pembahasan Ekonomi Islam
- Bab IV : Pembahasan.** Dalam bab ini membahas tentang Bagaimana pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang Politik Ekonomi Islam; Bagaimana analisis Ekonomi Islam terhadap Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang politik Ekonomi Islam.
- Bab V : Penutup.** Bab ini berisi tentang Kesimpulan dari hasil permasalahan dalam penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan terkait permasalahan dalam penelitian yang dilaksanakan.

BAB II

BIOGRAFI TAQIYUDDIN AN-NABHANI

A. Sejarah Singkat Taqiyuddin An-Nabhani

Nama lengkap Taqiyuddin an-Nabhani adalah asy-Syaikh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthofa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Gelar “an-Nabhani” dinisbatkan kepada kabilah Bani Nabban, yang termasuk orang Arab penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim di daerah Ijzim yang termasuk dalam wilayah Hanifa di Palestina Utara.

Syaikh An- Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909 M. beliau mendapat pendidikan awal dari ayahnya sendiri yaitu seorang alim yang faqih terhadap agama. Ayah beliau seorang pengajar ilmu syari’ah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibunya menguasai beberapa cabang ilmu Syari’ah, yang diperoleh dari datuknya, Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani. Beliau adalah seorang qadhi (hakim), penyair, sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka di dalam Daulah Utsmaniyah.¹

Syaikh Yusuf An-Nabbani termasuk tokoh sejarah masa akhir Khilafah Utsmaniyah. Beliau berpendapat bahwa Khalifah Utsmaniyah merupakan penjaga agama dan aqidah, simbol kesatuan kaum muslimin, dan mempertahankan institusi umat.²

¹ Herry Muhammad dkk, *Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h.302.

² *Ibid*, h. 303.

Pertumbuhan Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam suasana keagamaan seperti itu, ternyata mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan keperibadian dan pandangan hidupnya. Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani telah menghafal Al-Qur'an dalam usia yang amat muda, yaitu sebelum beliau mencapai umur 13 tahun. Beliau banyak mendapat pengaruh dari datuknya, Syaikh Yusuf an-Nabhani dalam banyak hal. Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani juga sudah juga mengerti masalah-masalah politik yang penting, dimana datuk beliau menempuh atau mengalami peristiwa-peristiwa tersebut secara langsung karena hubungannya yang rapat dengan para Khalifah daulah Utsmaniyah saat itu. Beliau banyak menimba ilmu melalui majlis-majlis dan diskusi-diskusi fiqih yang diselenggarakan oleh datuknya.

Kecerdasan dan kecerdikan Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani yang menonjol tatkala mengikuti majlis-majlis ilmu tersebut telah menarik perhatian datuknya. Oleh sebab itu, datuk beliau begitu memperhatikan Syaikh Taqiyuddin dan berusaha meyakinkan ayah beliau Syaikh Ibrahim bin Musthafa mengenai perlunya mengantar Syaikh Taqiyuddin ke al Azhar untuk melanjutkan pendidikannya dalam ilmu syari'ah.³

B. Pendidikan Taqiyuddin An-Nabhani

Asy-Syeikh Taqiyuddin belajar dasar-dasar ilmu syariah dari ayah dan kakeknya. Beliau telah hafal al-Qur'an seluruhnya sebelum baligh. Di samping itu, beliau juga belajar di sekolah negeri *An-Nizhomiyyah* di daerah Ijzim untuk

³<http://pemumpasjalananmultiplay.com/journal/item/16>

sekolah tingkat dasar. Kemudian, beliau melanjutkan studinya ke sekolah tingkat menengah di Akka. Belum selesai studinya pada tingkat menengah di Akka, beliau pergi ke Kairo untuk meneruskan studinya di Al-Azhar, guna merealisasikan keinginan kakeknya, Asy-Syeikh Yusuf an-Nabhani, yang telah menyakinkan ayahnya tentang pentingnya mengirim Asy-Syeikh Taqiyuddin ke Al-Azhar untuk melanjutkan pendidikan agamanya.⁴

Kemudian, Asy-Syeikh Taqiyuddin meneruskan pendidikan tingkat menengahnya di Al-Azhar pada tahun 1928, dan pada tahun yang sama beliau lulus dan memperoleh ijazah dengan predikat sangat memuaskan. Setelah lulus dari sekolah tingkat menengah, lalu Asy-Syeikh Taqiyuddin melanjutkan studinya di Darul Ulum, yang ketika itu masih merupakan filial Al-Azhar.

Di samping itu, beliau juga aktif menghadiri kelompok-kelompok kajian (halaqoh-halaqoh) ilmiah di Al-Azhar, yang diadakan oleh para asy-Syeikh, seperti yang telah disarankan oleh kakeknya, di antaranya, kelompok kajian yang diadakan Asy-Syeikh Muhammad al-Hidhir Husain. Hal itu dimungkinkan karena sistem pengajaran yang lama di Al-Azhar membolehkannya. Di mana para mahasiswa dapat memilih beberapa Asy-Syeikh Al-Azhar dan menghadiri halaqoh-halaqoh mereka mengenai bahasa dan ilmu-ilmu syariah, di antaranya fiqih, ushul fiqih, hadits, tafsir, tauhid (ilmu kalam), dan yang sejenisnya.⁵

⁴ Muhammad Muhsin Rodi, *Hizb at-Tahrir, Tsaqofatuhu wa Manhajuhu fi Iqomah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah*, Diterjemahkan oleh Muhammad Bajuri, dkk, dengan judul *Tsaqofah Dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyyah*, (Bangil: Al-Izzah, 2008), h. 61.

⁵ *Ibid*, h. 61-62.

Pada tahun 1932 M, Asy-Syeikh Taqiyuddin menyelesaikan studinya di Darul Ulum. Pada tahun yang sama, beliau juga selesai kuliahnya di Al-Azhar Asy-Syarif.⁶ Beberapa ijazah yang diraih Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani di antaranya adalah:⁷

1. Ijazah Tsanawiyah al-Azhariyah
2. Ijazah al-Ghuraba' dari al-Azhar
3. Diploma Bahasa dan Sastra Arab dari Dar al Ulum
4. Ijazah dalam Peradilan darel Ma'had al-Ali li al-Qadha' (Sekolah Tinggi Peradilan)
5. Pada tahun 1932 beliau meraih Syahadah al-'Alamiyyah (Ijazah Internasional) Syariah dari Universitas al-Azhar asy-Syarif dengan mumtaz jiddan.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di, Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani kembali ke Palestina untuk kemudian bekerja di Kementerian Pendidikan Palestina sebagai seorang guru di sebuah Sekolah Menengah Atas Negeri di Haifa. Di samping itu, beliau juga mengajar di sebuah Madrasah Islamiyyah di Haifa. Beliau sering berpindah-pindah lebih dari lebih dari satu kota dan sekolah semenjak tahun 1932 sampai tahun 1938, ketika beliau mengajukan permohonan untuk bekerja di Mahkamah Syariah. Beliau lebih mengutamakan bekerja di bidang peradilan (*qadha'*) karena beliau menyaksikan pengaruh imperialis Barat dalam bidang peradilan, terutama peradilan syar'y.⁸

⁶ Ihsan Samarah, *At-Ta'rif bi Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*, Diterjemahkan oleh Muhammad Sidiq Al-Jawi, dengan judul *Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2003), h. 10.

⁷ <http://pemumpasjalananmultiplay.com/journal/item/16>

⁸ Ihsan Samarah, *op.cit*, h. 11-12.

C. Karya-Karya Yang Ditinggalkan

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani meninggal dunia pada tahun 1398H/1977M, dan dikuburkan di al-Auza'i-Beirut. Beliau telah meninggalkan banyak karya-karya agung yang dianggap sebagai kekayaan pemikiran yang tak ternilai harganya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani merupakan seorang yang mempunyai pemikiran yang genius dan seorang penganalisis unggul. Beliaulah yang menulis seluruh pemikiran dan pemahaman Hizbut Tahrir, baik yang berkenaan dengan hukum-hukum syara', maupun yang lainnya seperti masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, uqubat dan sebagainya.

Kebanyakan karya-karya Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani berupa kitab-kitab *tanzhiriyyah* (penetapan pemahaman/pandangan) dan *tanzhimiyah* (penetapan peraturan), atau kitab untuk mengajak kaum muslimin untuk mengembalikan kehidupan Islam dengan jalan mendirikan *Daulah Khilafah Islamiyah*. Al-Ustadz Dawud Hamdan telah menjelaskan karakter kitab-kitab Syaikh Taqiyuddin yang termasuk kitab-kitab yang disebar luaskan oleh Hizbut Tahrir secara mendalam dan tepat dan pernyataannya “ sesungguhnya kitab ini yakni Ad Daulah Al-Islamiyyah bukanlah sebuah kitab untuk sekedar dipelajari, akan tetapi kitab ini dan kitab lainnya yang telah disebar luaskan oleh Hizbut Tahrir seperti kitab *Usus An-Nahdhah*, *Nizamul Islam*, *An-Nizham Al-Ijtima'i fi Al Islam*, *An Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam*, *Nizham Ak-Hukm*, *Asy Syakhshiyah Al-Islamiyah*, *At Takatul Al-Hizbi*, *Mafahim Hizbut Tahrir*, *Mafahim kaum Muslimin* dengan jalan mengembalikan kehidupan Islam dan mengembangkan dakwah Islamiyah.

Kitab-kitab Syaikh Taqiyuddin terlihat istimewa karena mencakup dan meliputi berbagai aspek-aspek kehidupan dan permasalahan manusia. Kitab-kitab yang mengupas aspek-aspek kehidupan individu, politik, kenegaraan, sosial, dan ekonomi tersebut, merupakan landasan ideologi dan politik bagi Hizbut Tahrir, dimana Syaikh Taqiyuddin menjadi motornya (pengeraknya).

Karya-karya Syaikh Taqiyuddin mencakup berbagai bidang, maka tak heranlah jika karya-karya beliau mencapai lebih dari 30 kitab. Ini termasuk memorandum-memorandum politik yang beliau tulis untuk memecahkan permasalahan politik, serta masyrah-nasyrah dan penjelasan-penjelasan mengenai masalah-masalah pemikiran dan masalah-masalah politik yang penting.

Karya-karya Syaikh Taqiyuddin, baik yang berkenaan dengan politik maupun pemikiran, mempunyai satu identitas yang sama yaitu dengan adanya kesadaran, kecermatan dan kejelasan, serta sangat sistematis, sehingga beliau dapat menampilkan islam sebagai ideologi yang sempurna dan komprehensif yang diistinbath dari dalil-dalil syar'i yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karya-karya beliau dapat dikategorikan sebagai "buah pemikiran" pertama yang disajikan oleh seorang pemikir muslim pada era modern ketika itu dan hingga kini.

Karya-karya Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani yang paling terkenal, yang memuat pemikiran dan ijtihad beliau antara lain;

1. *Nizhamul Islam*
2. *At Takattul Al-Hizbi*
3. *Mahafim Hizbut Tahrir*

4. *An-Nizhamul Iqtishadi fil Islam*
5. *An-Nizhamul Ijtima'i fil Islam*
6. *Nizamul Hukm fil Islam*
7. *Ad Dastur*
8. *Muqaddimah Dastur*
9. *Ad-Daulatul Islamiyah*
10. *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah (3 jilid)*
11. *Mafahim Syasiah li Hizbit Tahrir*
12. *Nazharat Siyasiyah li Hizbit Tahrir*
13. *Nida' Haar*
14. *Al-Khilafah*
15. *At Tafkir*
16. *Ad-Dusiyah*
17. *Sur'atul Badiah*
18. *Nuqthatul Inthilaq*
19. *Dukhul Mujtama'*
20. *Inqadzu Filisthin*
21. *Risalatul Arab*
22. *Tasalluh Mishr*
23. *Al-Ittifaqiyyah Ats-Tsana'iyyah Al-Mishriyyah As-Suriyyah wal
Yamaniyyah*
24. *Nazariyatul Firagh As-Siyasi Haula Masyru' Aizanhawar.*⁹

Semua ini belum termasuk ribuan selebaran-selebaran (nasyrah) mengenai permikiran, politik dan ekonomi serta beberapa kitab yang dikeluarkan oleh Syaikh Taqiyuddin atas nama anggota Hizbut Tahrir dengan

⁹ *Ibid.* h. 32-33.

maksud agar kitab-kitab itu mudah beliau sebar luaskan setelah adanya undang-undang yang melarang peredaran kitab- beliau. Diantara kita itu adalah (1) *As-Siyasah Al-Iqtishadiyah kitab Al-Mutsla*, (2) *Naqadhul Isytirakiyah Al-Marksiyah*, (3) *Kaifa Hudimat Al-Khilafah*, (4) *Ahkamul Buyyinat*, (5) *Nizamul Uqubad*, (6) *Ahkamush Shalat*, dan (7) *Al-Fikru Al-Islami*.¹⁰

Apabila karya-karya Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani tersebut dikaji dengan ikhlas, adil dan seksama, terutama yang berkenaan dengan aspek hukum dan ilmu ushul, akan nampak bahwa beliau sesungguhnya adalah seorang mujtahid yang mengikuti metode para fuqaha dan mujahidin yang terdahulu. Hanya saja, beliau tidak pernah mengikuti salah satu mazhab atau aliran dalam berijtihad, baik mazhab aqidah seperti ahlus Sunnah atau Syiah, maupun mazhab fiqih seperti Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali dan sebagainya. Dengan kata lain, beliau tidak pernah mengkritik dan tidak pernah mengistiharkan bahwa beliau mengikuti suatu mazhab tertentu diantara mazhan-mazhab yang dikenal, akan tetapi beliau memilih dan menetapkan (mentabanni) ushul fiqih beliau sendiri yang khusus baginya, dan dari situ beliau mengistimbatkan hukum-hukum syara'. Ushul fiqih serta ijtihad beliau ini, sebagian besarnya dijadikan pegangan oleh seluruh umat Islam yang bergabung didalam Hizbut Tahrir.

Namun perlu diingat dan ditegaskan disini, bahwasanya ushul fiqih yang dibawa oleh Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani tidaklah keluar dari metode fiqih benar sebagaimana salafush sholeh, yang membatasi dalil-dalil syar'i kepada kitab, As-Sunnah, Ijma' sahabat, dan Qiyas Syar'a semata.¹¹

¹⁰ Ihsan Samarah, *op.cit*, h. 34.

¹¹ *Ibid.* h. 34.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG POLITIK EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Politik Ekonomi Islam

Bila dilihat dan ditelusuri dari makna bahasa, maka “politik ekonomi Islam” terdiri dari tiga penggalan kata, yaitu “politik”, “ekonomi”, dan “Islam”. Politik memiliki makna “cara, siasat, strategi dalam melakukan sesuatu”.¹ Menurut Abdul Qadim Zallum, politik sama dengan siyash, mempunyai makna “mengatur urusan umat, baik secara dalam maupun luar Negeri”. Dalam hal ini, Negaralah yang mengatur urusan tersebut secara praktis, sedangkan umat mengoreksi (*muhasabah*) Pemerintah dalam melakukan tugasnya.²

Adapun “ekonomi”, berasal dari bahasa Latin Kuno dengan asal kata “greek” memiliki makna “mengurus urusan rumah tangga”, dimana semua anggota keluarga yang mampu untuk ikut ambil bagian dalam menghasilkan barang, menjalankan pelayanan (jasa) dan menikmati apa-apa yang mereka peroleh.³

Kemudian, manusia memperluas pengertian “rumah tangga” hingga kata itu diperluas cakupannya yang meliputi kelompok (masyarakat) yang diperintah oleh suatu negara sekalipun. Dengan demikian yang dimaksud dengan ekonomi tidak hanya dalam artian “pemuhan” dan bukan pula

¹ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya; Karya Abditama, 2001), h. 561.

² Abdul Qadim Zallum, *Political Thought (Afkar Siyasiyah)* (terj), Diterjemahkan Abu Faiz, dengan judul *Pemikiran Politik Islam*, (Bangil: Al-Izzah, 2004), h. 11.

³ Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam: Dasar-Dasar Pengembangan*, (Pekanbaru, Suska Press, 2008), h. 5.

dalam pengertian “*harta*”, akan tetapi ekonomi dalam pengertian yaitu mengurus urusan rumah tangga, baik dengan meningkatkan dan mengamankan produksinya atau cara pembagian. Ekonomi dalam lingkup meningkatkan dan mengamankan produksinya, merupakan bahasan dalam lingkup “ilmu ekonomi”, sementara berkaitan dengan cara pembagian, merupakan bahasan dalam lingkup sistem ekonomi.⁴

Pengertian ekonomi di atas, senada dengan ekonomi menurut Paul A. Samuelson, ekonomi pada hakikatnya berkaitan dengan produksi dan distribusi di antara orang-orang.⁵ Selanjutnya, Mawardi juga memaparkan pengertian ekonomi, yang menurutnya ekonomi mengandung pengertian hemat dan penuh perhitungan. Pengertian ini dirumuskan dengan mengkomparasikan antara pengertian ekonomi dengan istilah dalam bahasa Arab yang menggunakan kata “*Iqtishad*”.⁶

Sementara Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Muhammad SAW yang mengatur hubungan manusia dengan pencipta, dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan sesama.⁷ Hubungan manusia dengan pencipta, mengatur dalam aspek aqidah dan ibadah. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri, mengatur dalam aspek, makan, minum, berpakaian dan akhlak. Sementara hubungan manusia dengan sesama mengatur dalam aspek muamalah dan sanksi-sanksi.⁸

⁴ *Ibid.*

⁵ Tahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1985), h. 6-7.

⁶ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru, Alaf Riau, 2007), h. 2.

⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizhaamu Al-Islam*, Diterjemahkan oleh Abu Amin, dkk dengan judul *Peraturan Hidup Dalam Islam*, (Bogor: Al-Izzah, 2005), h. 181.

⁸ *Ibid.*

Dari sini maka terlihat jelas dan dapat disimpulkan bahwa Islam tidak hanya sekedar agama (yang mengatur urusan ritual manusia dengan pencipta), melainkan Islam juga ideologi yang mengatur dalam urusan kehidupan umat manusia. Karena kalau Islam hanya sekedar urusan ritual, maka Islam hanya mengatur satu aspek/ hubungan saja. Padahal, dari pengertian di atas, Islam mengatur dalam aspek/ hubungan.

Di samping itu, pengertian "*politik ekonomi Islam*" dilihat dari tiga penggalan kata sebagaimana diuraikan di atas, maka perlunya merujuk kepada makna istilah (terminologi), karena dari pengertian istilah akan terhimpun dan terdapat suatu pemahaman yang utuh dari pengertian "*politik ekonomi Islam*" itu sendiri.

Menurut Puspo Widiastomo, secara terminologi, "*politik ekonomi*" adalah tujuan yang akan dicapai oleh kaedah-kaedah hukum yang dipakai untuk berlakunya suatu mekanisme pengaturan kehidupan masyarakat. Sementara "*politik ekonomi Islam*" adalah "suatu jaminan untuk tercapainya pemenuhan semua kebutuhan hidup pokok (*basic needs*) tiap orang secara keseluruhan tanpa mengabaikan kemungkinan seseorang dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar potensi yang dimilikinya sebagai seorang individu yang hidup di tengah komunitas manusia.⁹ Pengertian ini juga diungkapkan oleh Veithzal Rivai dan Andi Buchari dalam bukunya "*Mengislamkan Ekonomi Masyarakat dan Memasyarakatkan Ekonomi Islam*".¹⁰

⁹ Puspo Widiastomo dalam <http://Ownerdeshion.com/> diakses pada 12 April 2012//.

¹⁰ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Mengislamkan Ekonomi Masyarakat dan Memasyarakatkan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 38.

Pengertian di atas, terdapat beberapa point penting, yaitu: (1) Adanya jaminan pemenuhan kebutuhan pokok, (2) Memberikan kemungkinan bagi tiap individu tanpa terkecuali untuk memperoleh kebutuhan sekunder dan tersier. Selanjutnya, dari beberapa point penting pengertian “*politik ekonomi Islam*” di atas, hal ini peran utama dari negara dalam masalah tersebut.

Adapun peran negara dalam kaitannya dengan ekonomi, sesungguhnya negara berkewajiban mengelola aset-aset umum yang digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini negara tidak boleh mengalihkan kepemilikan dan pengelolaan aset-aset umum (kepemilikan umum) kepada individu maupun sekelompok individu.¹¹

Disamping itu, dalam kaitannya dengan peran negara dalam menjaga berbagai bentuk asset dari kepemilikan umum, sesuai dengan tujuan mulia dari penerapan hukum syara’ di tengah-tengah umat dalam lingkup negara, di antara memelihara harta (*muhaafazhah alaa al-Maal*). Dari delapan tujuan luhur syariat Islam, yaitu: memelihara keturunan, akal, kemuliaan, jiwa, harta, agama, ketentraman/keamanan, dan memelihara negara.¹²

Beberapa tujuan luhur di atas, terutama dalam kaitannya dengan “*memelihara harta*”, dapat dipahami bahwa jaminan yang diberikan negara tentu tidak hanya harta yang dimiliki oleh individu dalam suatu negara semata, melainkan dalam lingkup luas, tidak menyerahkan asset-asset negara (khususnya kepemilikan umum) kepada individu maupun sekelompok individu.

¹¹ Endah Kartikasari, *Membangun Indonesia Tanpa Pajak dan Utang: Membedah APBN 2005-2010 VS APBN Khilafah*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), h. 47.

¹² Hafidz Abdurrahman, *Islam Politik dan Spiritual*, (Jakarta: Wadi Press, 2002), hlm. 192.

Di sisi lain, dalam kaitannya membahas “*politik ekonomi Islam*”, yang menjamin kebutuhan pokok dan memberikan kesempatan kepada individu untuk meraih kebutuhan sekunder dan tersier, dimana pertama-pertama Islam memandang seseorang sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang harus diperhatikan serta dipenuhi semua kebutuhan primernya secara menyeluruh.

Setelah itu, Islam memberikan peluang pada semua orang sesuai dengan kapasitasnya untuk dapat memenuhi kebutuhan baik sekunder maupun tersiernya. Kemudian, pada saat yang bersamaan Islam juga mengingatkan bahwa seseorang secara naluriah selalu terikat dengan kondisi lingkungan sosialnya yang diatur dengan mekanisme tertentu dan sesuai dengan gaya yang tertentu pula. Sehingga “*Politik ekonomi Islam*” tidak hanya berupaya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat saja dalam suatu negara dengan mengabaikan kemungkinan terjamin tidaknya kebutuhan hidup tiap-tiap individu. Akan tetapi, “*Politik ekonomi Islam*” juga tidak hanya bertujuan untuk mengupayakan kemakmuran individu semata tanpa kendali, dan tanpa memperhatikan terjamin tidaknya kehidupan tiap individu lainnya.¹³

Syariat Islam telah menjamin tercapainya pemenuhan kebutuhan pokok/primer tiap anggota masyarakat secara menyeluruh baik sandang, pangan maupun papan. Dalam hal ini Islam mewajibkan bagi tiap laki-laki bekerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokoknya berikut kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jika orang tersebut tidak bisa

¹³ Puspo Widiastomo dalam [http://Ownerdeshion.com/12 April 2012//](http://Ownerdeshion.com/12April2012//).

bekerja, maka kewajiban itu dipikulkan kepada anak-anak serta ahli warisnya untuk memenuhi kebutuhan primernya. Dan jika yang menanggung kebutuhan pokoknya tidak ada maka kewajiban itu dibebankan kepada baitul maal atau negara. Jadi disini negara berkewajiban mengatur suatu tatanan ekonomi agar tiap anggota masyarakat yang berkewajiban untuk bekerja dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Islam mendorong orang agar bias menikmati rezeki yang halal serta dapat mengkonsumsi barang-barang sesuai dengan kemampuannya.

Pada aspek lain Islam melarang negara untuk mengambil pajak dari harta seseorang meskipun itu untuk kepentingan umat selain dari sisa pemenuhan kebutuhan hidupnya secara wajar. Untuk menjaga stabilitas kehidupan sosial masyarakat dari hal-hal yang tidak dibenarkan syariat Islam melarang untuk memproduksi dan mengkonsumsi minuman keras. Bahkan minuman keras tidak dianggap sebagai barang ekonomi.

Disamping itu Islam juga mengharamkan riba dan bahkan Islam menganggap riba bukan sebagai barang ekonomi. Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat harus menyentuh semua lapisan masyarakat baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier sesuai dengan kemampuan tiap individu. Dalam hal ini Islam mengarahkan bagaimana barang-barang ekonomi tersebut bisa diperoleh secara cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu menunjukkan pentingnya seseorang untuk dapat bekerja mencari rezeki. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist yang menjelaskan mengenai pentingnya seseorang harus bekerja.

Dalam suatu peristiwa Rasulullah SAW menyalami tangan Sa'ad bin Mua'adz yang dirasakannya kasar kemudian ditanya lalu Sa'ad menjawab bahwa dia selalu bekerja memenuhi kebutuhannya dengan mengayunkan kapak. Kemudian Rasulullah menciumi tangan Sa'ad seraya menyatakan bahwa:

“Inilah dua telapak tangan yang disukai oleh Allah SWT” dan Rasulullah juga bersabda “Tidaklah seseorang makan sesuap saja yang lebih baik, selain ia makan dari hasil kerja tangannya sendiri”

Dengan demikian, sistem *“politik ekonomi Islam”* merupakan seperangkat instrumen dalam sebuah negara agar dapat terwujud kehidupan masyarakat yang harmonis. Namun cita-cita ini sangat sulit untuk diwujudkan mengingat besarnya kekuatan raksasa dari ideologi sekuler yang menghambat, menghalangi dan ingin menghancurkan sistem ekonomi Islam melalui berbagai strategi seperti pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kependudukan, politik dan sebagainya.

B. Tujuan Politik Ekonomi Islam

Pada uraian sebelumnya telah diketahui tujuan dari *“politik ekonomi Islam”* yang terdapat dalam pengertian dari *“politik ekonomi Islam”* itu sendiri, sehingga dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dari *“politik ekonomi Islam”* adalah pengaturan mekanisme kehidupan masyarakat. Sehingga dengan mekanisme pengaturan tersebut, maka terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam suatu negara.¹⁴

¹⁴ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *loc.cit.*

Tujuan dari sistem “*politik ekonomi Islam*”, secara umum selaras dengan tujuan dari sistem ekonomi Islam itu sendiri, yaitu:

1. Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Pokok

Kebutuhan pokok manusia seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan mutlak harus dipenuhi. Islam telah mengatur cara pemenuhan semua kebutuhan tersebut, termasuk kebutuhan penunjang yang vital seperti prasarana, sarana transportasi, dan komunikasi.¹⁵

Pemenuhan terhadap kebutuhan pokok di atas, disebabkan bahwa kebutuhan tersebut sangat erat kaitannya dengan persoalan kemiskinan. Karena kemiskinan wujud dari tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok yang dituntut dalam kehidupan, agar dapat hidup secara layak. Hal merupakan cerminan dari masyarakat yang ideal, adalah suatu masyarakat ketika seluruh individu anggotanya terbebas dari kemiskinan, dimana seluruh kebutuhan pokok tercukupi dan kebutuhan pelengkap sesuai dengan kemampuan masing-masing dan bersifat terbuka, sehingga dapat diupayakan dapat terpenuhi.¹⁶

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sistem politik ekonomi Islam secara komprehensif telah menetapkan sejumlah mekanisme dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memerangi kemiskinan.

Adapun sejumlah mekanisme dalam memerangi kemiskinan tersebut, terdapat beberapa upaya yang dilakukan, yaitu:

¹⁵ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 69.

¹⁶ *Ibid*, h. 67.

- a. Menetapkan kewajiban setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan cara bekerja;
- b. Negara berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan untuk setiap anggota masyarakat yang sanggup bekerja, namun tidak memiliki kesempatan untuk bekerja;
- c. Kedua dua mekanisme pertama dan kedua dari tujuan di atas tidak dapat diterapkan, Islam mewajibkan pemenuhan kebutuhan tersebut kepada kerabat dan *mahram*-nya;
- d. Pada kondisi tidak ada kerabat dan *mahram* yang mampu memenuhi kebutuhan pokok seorang individu, maka negara berkewajiban mencukupinya melalui kas zakat di Baitul Maal;
- e. Dapat saja dalam kondisi tertentu kas di Baitul Maal habis, maka negara akan mencukupinya dengan mengambil melalui kas lain, selain zakat;
- f. Bila kondisi kas di Baitul Maal habis, maka semua kaum Muslimin berkewajiban mencukupinya.¹⁷

Beberapa mekanisme di atas, di satu sisi senada yang diungkapkan oleh Veithzal Rivai dan Andi Buchari, dimana terkait dengan kondisi kemiskinan yang dihadapi individu Islam melarang individu untuk meminta-minta dan menghimbau untuk mendapatkan mata pencaharian dengan cara bekerja.¹⁸

¹⁷ *Ibid*, h. 71,-72, 74-77

¹⁸ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *op.cit*, h. 115.

Di sisi lain, tuntutan untuk mendapatkan pencaharian dengan cara bekerja, individu mengarahkan kepada pendirian sosial, dimana semua individu dipersatukan oleh ikatan kasih sayang dan persaudaraan, terutama persaudaraan antara sesama muslim, yang tidak dibatasi oleh kondisi geografis suatu negara.¹⁹

Dengan terlaksananya beberapa mekanisme di atas, sehingga persoalan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok dari setiap warga negara (kemiskinan), akan dapat teratasi. Dengan teratasinya kebutuhan tersebut, akan terwujudnya suatu masyarakat yang ideal dalam perspektif ekonomi Islam, dimana tidak ditemukan lagi adanya masyarakat miskin, yang pada faktanya kemiskinan tersebut yang dihadapi hampir seluruh negara yang di dunia saat ini. Kemudian dengan terwujudnya masyarakat yang ideal, maka tujuan dari politik ekonomi Islam dalam suatu negara akan terlaksana dan diterapkan, serta membuahi hasil sesuai yang diinginkan.

2. Keadilan Dalam Peran Serta Ekonomi

Dalam masyarakat Islam, setiap individu memiliki hak sekaligus kewajiban yang harus dipenuhi, dimana setiap individu memiliki hak untuk dapat hidup secara layak. Hak ini menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, individu lain (kerabat dan *mahram*-nya), dan negara. Tidak terpenuhinya hak tersebut, membuat seseorang tidak dapat menikmati kesejahteraan hidup, yang akan mengakibatkan masyarakat kacau dan munculnya kecemburuan sosial yang ditimbulkan oleh adanya ketimpangan taraf hidup di tengah masyarakat.²⁰

¹⁹ *Ibid*, h. 121.

²⁰ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *op.cit*, h. 82.

Dalam rangka menciptakan berbagai kesempatan berusaha dengan tujuan untuk menghindari ketimpangan taraf hidup di tengah masyarakat, Islam juga menerapkan berbagai mekanisme, yaitu:

- a. Penghapusan monopoli dengan segala bentuknya;
- b. Membolehkan seseorang memperoleh kekayaan yang lebih dari yang lain, sepanjang kekayaan tersebut diperoleh dengan benar;
- c. Mengatur penggunaan lahan sedemikian rupa agar dapat berfungsi ekonomis secara optimal dalam membuka kesempatan kerja.²¹

Dalam hal ini, semua individu dalam masyarakat melakukan kewajibannya dan untuk memberik kontribusi pada masyarakat atau pada produk sosial, dan bahwa tidak adanya eksploitasi seseorang kepada yang lain..²² Dengan terpenuhinya berbagai hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu dalam suatu negara, hal ini suatu bukti nyata dari terwujudnya keadilan dalam peran serta ekonomi. Dimana setiap individu dapat meraih dan merasakan kesejahteraan ekonomi tanpa terkecuali.

3. Stabilitas ekonomi dan pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian pokok yang *concern* setiap sistem ekonomi yang ada. Pertumbuhan merupakan fenomena penting yang dialami oleh ekonomi dunia. Menurut Kuznets, proses pertumbuhan ekonomi ini diistilahkan sebagai *modern economic growth*.²³

²¹ *Ibid*, h. 85-87.

²² Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *op.cit*, h. 127.

²³ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *op.cit*, h. 87.

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Kemampun ini disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu mengalami pertambahan baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Teknologi yang digunakan juga akan cenderung berkembang dan membantuk dalam mengolah dan memanfaatkan faktor-faktor produksi tersebut.²⁴

Ditegaskan lebih lanjut oleh Yusanto, bahwa pertumbuhan dalam konsep Islam, adalah mengangkat manusia dari kehidupan terbelakang dalam segala aspek kehidupannya termasuk sektor ekonomi, ke tingkat kehidupan yang lebih layak dan sejahtera. Hal ini akan dapat tercapai, dimana semua sektor ekonomi di masyarakat yang dibolehkan syariah berkembang secara optimal. Sebaliknya, sektor-sektor yang dilarang syariah ditinggalkan dan tidak diberikan tempat sedikitpun untuk berkembang.

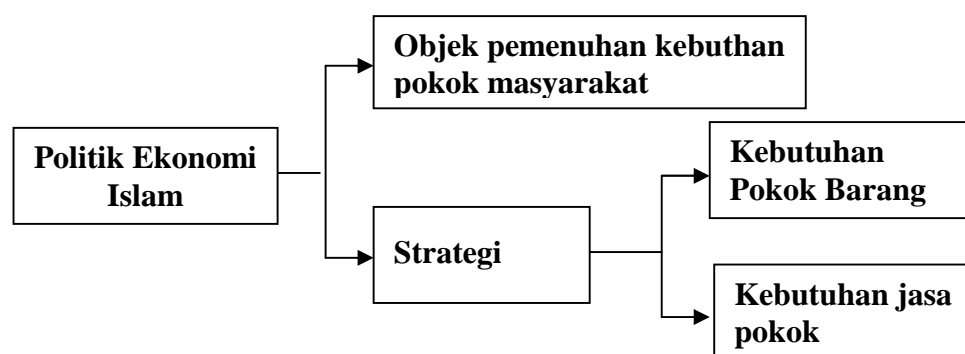
Maka dari itu, dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi di suatu negara akan memberi dampak terhadap stabilitas ekonomi itu sendiri. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi memberi pengaruh dan memiliki hubungan erat terhadap terciptanya stabilitas ekonomi dalam suatu negara. Kemudian, dari makna pertumbuhan dalam perspektif Islam, sebagaimana diuraikan di atas, dipahami bahwa Islam mengarahkan kepada individu untuk menerapkan dan melaksanakan praktek ekonomi dalam sektor rill, bukan sebaliknya.

²⁴ *Ibid.*

Di samping berkaitan dengan tujuan ekonomi yang merupakan tujuan dari sistem politik ekonomi itu sendiri, sebagaimana dijelaskan di atas, Mawardi menjelaskan bahwa terdapat dua tujuan, yaitu tujuan yang bersifat individu dan tujuan yang bersifat sosial. Pembagian ini berdasarkan pendapat-pendapat yang dirumuskan oleh para pakar ekonomi. Adapun tujuan individu adalah tujuan yang membolehkan individu dalam memenuhi kebutuhan pribadinya dan keluarganya. Sementara kebutuhan ekonomi yang bersifat sosial adalah kebutuhan yang dilakukan dalam rangka memberantas kemiskinan yang ada di masyarakat, pemberantasan kelaparan dan kemelaratan, pemberantasan penyakit dan pelayanan kesehatan yang memadai serta mobilisasi dan untuk memperkuat tujuan yang terpuji dalam kegiatan ekonomi sosial.²⁵

C. Ruang Lingkup Politik Ekonomi Islam

Dalam membahas ruang lingkup politik ekonomi Islam, M. Sholahuddin menjelaskan bahwa lingkungannya terdiri dari (1) objek pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat; (2) Strategi yang digunakan baik dari aspek kebutuhan barang pokok maupun kebutuhan jasa pokok.²⁶ Ruang lingkup ini dijelaskannya dengan menggunakan skema sebagai berikut:



²⁵ Mawardi, *op.cit*, h. 6.

²⁶ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 286.

1. Objek Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat

Sistem ekonomi Islam berupaya menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok (primer) setiap warga negara (Muslim dan non-Muslim) secara menyeluruh. Barang-barang berupa pangan, sandang dan papan adalah kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Tidak seorang pun yang dapat melepaskan diri dari kebutuhan tersebut. Keamanan, pendidikan dan kesehatan juga merupakan kebutuhan penting lainnya yang harus dihadapi oleh manusia dalam hidupnya.

Menyangkut keamanan, tidak mungkin setiap orang dapat menjalankan seluruh aktivitasnya terutama aktivitas yang wajib, seperti ibadah, bekerja, bermuamalat secara Islami, termasuk menjalankan aktivitas Pemerintahan sesuai dengan ketentuan Islam tanpa adanya keamanan yang menjamin pelaksanaannya. Meskipun demikian, jelaslah bahwa harus ada jaminan keamanan bagi setiap warga negara. Adapun yang menyangkut kesehatan, tidak mungkin setiap manusia dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa adanya kesehatan yang cukup untuk melaksanakannya. Sementara menyangkut dalam masalah pendidikan, tidak mungkin manusia mampu mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat, kecuali seseorang memiliki ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk mencapainya.²⁷

²⁷ *Ibid*, h. 287.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa objek yang harus dipenuhi dari kebutuhan pokok masyarakat berupa kebutuhan dalam berupa sandang, pangan, papan, keamanan, kesehatan dan pendidikan. Enam dari kebutuhan pokok di atas merupakan kebutuhan yang bersifat mutlak dan harus dipenuhi setiap individu tanpa terkecuali serta individu tersebut mampu menggapainya. Sehingga dengan tercapainya berbagai kebutuhan pokok masyarakat, maka secara otomatis masyarakat akan memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan baik hidup di dunia maupun di akhirat.

Dalam rangka mewujudkan berbagai objek kebutuhan pokok masyarakat, maka perlunya menerapkan sistem politik ekonomi Islam dalam suatu negara, dan tidak menerapkan sistem politik selain Islam. Karena, sistem politik ekonomi Islam dalam menjamin dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dimana lebih menekankan kepada kebutuhan masyarakat yang bersifat individual, bukan secara kolektif. Maka dari itu, kesejahteraan dan kebahagiaan yang seharusnya dicapai masyarakat tidak diukur dari total pendapatan dari suatu Negara yang dilihat dari tinggi GNP (*Gross National Product*), melalin kesejahteraan dan kebahagiaan suatu masyarakat dengan melihat secara perorangan (person). Dalam artikata, bila suatu negara ada ditemukan satu, dua atau lebih dari masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka suatu negara belum dikatakan sejahtera dan bahagia.

Pandangan demikian, juga dipengaruhi oleh pandangan Islam dalam melihat individu dengan masyarakat (jemaah), dimana Islam dalam melihat individu dan masyarakat sebagaimana pandangan di luar Islam (Kapitalisme dan Sosialisme). Dimana, Islam dalam memandang antara individu dengan masyarakat merupakan satu kesatuan yang integral yang keduanya sama-sama pada posisi selaku makhluk ciptaan Allah SWT dan memiliki kesadaran akan hubungannya dengan Khaliq-Allah SWT. Sementara dalam sistem Kapitalisme memandang antara masyarakat dan individu, dimana masyarakat terbentuk dari individu. Adapun sosialisme berpandangan bahwa individu dan masyarakat (jemaah) yang merupakan bagian dari alam.²⁸

Dalam kaitannya dengan masalah jaminan kesejahteraan secara individu yang pada hakikatnya merupakan peran dan tanggung jawab Negara, ketika individu, kerabat dan *mahram*-nya tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi suatu keluarga. Menurut Jaribah, ada tiga bentuk tanggung jawab dalam bentuk jaminan sosial (*takafu al-ijtima'i*), yaitu (1) Tanggung jawab individu, (2) Tanggung jawab masyarakat, dan (3) Tanggung Jawab Negara. Tanggung jawab individu dalam memberikan jaminan sosial adalah tanggung jawab personil (*fardh 'ain*) yang diemban oleh seseorang yang mampu terhadap seseorang yang mampu terhadap orang yang membutuhkan dari orang yang wajib dia nafkahi. Adakalanya karena hubungan kerabat untuk merealisasikan kecukupan mereka, dan adakalanya karena hubungan kerabat untuk merealisasikan kebutuhan mereka.²⁹

²⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, *op.cit*, h. 43-44, 47.

²⁹ Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Khattab*, Diterjemahkan oleh Asmuni Sholehan Zamakhsyari, dengan judul *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab*, (Jakarta: KHALIFA-Pustaka Al-Kautsar Group, 2006), h. 290.

Adapun tanggung jawab masyarakat dalam memberikan jaminan sosial, dimana sesungguhnya hukum asal bahwa *ulil amri* (pemerintah) mencerminkan masyarakat dalam merealisasikan jaminan sosial. Akan tetapi, jika *ulil amri* tidak melaksanakannya, maka tanggung jawab tersebut menjadi *fardh al-kifayah* bagi masyarakat dalam melaksanakannya.³⁰

Namun, dalam lingkup tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan sosial, adakalanya tanggung jawab tersebut adakalanya secara langsung, yaitu dengan merealisasikan kebutuhan dari *Baitul Maal* terhadap orang-orang yang tidak mampu; dan terkadang ada yang adakalanya secara tidak langsung, yaitu dengan mewajibkan individu dan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban terhadap orang-orang yang membutuhkan.³¹

Selanjutnya, terdapat beberapa bidang jaminan sosial yang merupakan tanggung jawab, baik individu, masyarakat, dan Negara, yaitu: (1) Fakir dan miskin, (2) Janda dan anak yatim, (3) Orang sakit dan orang lumpuh, (4) Keturunan para mujahid, (5) Tawanan perang, (6) Hamba sahaya, (7) Tetangga, (8) Narapidana, (9) Orang yang banyak utang, (10) Ibnu sabil, (11) Anak temuan, dan (12) Ahli Dzimmah.

Dari beberapa bidang jaminan di atas, menurut Jaribah diambil dari beberapa sumber jaminan sosial, yaitu: (1) Sistem nafkah wajib, (2) Nafkah sunnah (berupa wakaf, pemberian, batas-batas infak sunnah; (3) Sumber-sumber umum (berupa, tanah larangan, pengeloan lahan mati dan pengaplingannya, pemberdayaan orang-orang kaya.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid*, h. 291.

2. Strategi Politik Ekonomi Islam

Secara garis besar, strategi pemenuhan kebutuhan pokok berupa barang (pangan, sandang, papan) dan kebutuhan pokok berupa jasa (keamanan, kesehatan dan pendidikan). Pemenuhan kebutuhan pokok berupa barang dijamin dengan mekanisme tidak langsung, yakni dengan jalan menciptakan kondisi dan sarana yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan tersebut. Sebaliknya, kebutuhan jasa pokok dipenuhi dengan mekanisme langsung, yakni pemenuhan langsung oleh negara.³²

a. Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pokok Barang

Pemenuhan kebutuhan tersebut, dilaksanakan secara bertahap, yaitu:

- 1) Negara memerintahkan kepada setiap kepala keluarga bekerja mencari nafkah.
- 2) Negara menyediakan berbagai fasilitas lapangan pekerjaan agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan.
- 3) Negara memerintahkan kepada setiap ahli waris atau kerabat terdekat, untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok orang-orang tertentu, jika ternyata kepala keluarganya sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

³² M. Sholahuddin, *op.cit*, h. 287.

- 4) Negara wajibkan kepada tetangga terdekat yang mampu untuk memenuhi sementara kebutuhan pokok, (pangan) tetangganya yang kelaparan.
- 5) Negara secara langsung memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan seluruh warga Negara tidak mampu dan membutuhkan.³³

Dari beberapa tahapan yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan pokok, sehingga jelaslah bahwa dengan menerapkan strategi politik ekonomi Islam dalam sebuah Negara, dimana setiap individu dipastikan dapat meraih dan memiliki dan kesejahteraan dan kebahagiaan terutama dalam aspek ekonomi.

Hal demikian, tentunya bertolak belakang dengan fakta masyarakat yang tidak menerapkan sistem politik ekonomi Islam sebagaimana saat ini, sehingga berbagai persoalan dalam bidang ekonomi tidak kunjung selesai dan menemukan solusi. Meskipun demikian, tidak dipungkiri dengan menerapkan sistem politik lain dapat menemukan jalan keluar, hanya saja tawaran demi tawaran yang disampaikan dan dilaksanakan bersifat parsial, tidak mendasar dan menyeluruh. Sehingga, persoalan ekonomi yang dihadapi individu saat ini dengan harapan memperoleh penyelesaian, namun membuat permasalahan tersebut semakin melebar dan meluas serta dapat dipastikan tidak menemukan solusi. Misalkan, dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi bangsa, Negara melakukan pengurangan subsidi berkaitan dengan harga BBM yang dibutuhkan oleh individu, memberikan bantuan langsung yang bersifat tunai (BLT), memberikan subsidi BBM kepada fakir miskin, dan lain sebagainya.

³³ *Ibid*, h. 288.

Sungguh, dari cara-cara dan upaya yang telah dilakukan Negara, sebagaimana dijelaskan di atas, meskipun mampu membantu perekonomian umat, namun cara dan upaya ini hanya bersifat parsial dan sesaat dan tidak mampu menuntaskan persoalan ekonomi yang sedang dialami umat. Faktanya tingkat perekonomian individu saat ini semakin menderita, terpuruk dan menyedihkan. Sehingga, ada di antara pengamat ekonomi mengatakan setelah melihat kondisi tingkat perekonomian masyarakat, maka sulit untuk membuat istilah yang pas dari kondisi tingkat perekonomian tersebut.

b. Strategi Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pokok

Berbeda dengan kebutuhan pokok berupa barang dengan kebutuhan pokok berupa jasa dipenuhi secara langsung kepada setiap individu rakyat. Hal ini karena, pemenuhan kebutuhan jasa produk termasuk aktivitas dalam masalah “*ria’ayah asy-syu’uun*” (pelayanan umum) dan kemashlahatan hidup terpenting. Dalam hal ini Negara berkewajiban mewujudkan pemenuhannya bagi seluruh rakyat. Sementara seluruh biaya yang dibutuhkan ditanggung oleh Negara. Adapun mekanisme untuk menjamin anggota masyarakat, adalah dengan jalan menerapkan *huduud* (*qishash*, potong tangan bagi pencuri, denda (*diyat*), dan sebagainya).³⁴

³⁴ *Ibid*, h. 292.

Sementara dalam kaitannya pemenuhan kebutuhan jasa pokok yang dilakukan negara secara langsung, kembali merujuk kepada aktivitas Rasul SAW, dimana Beliau SAW pernah dihadiahkan seorang dokter pribadi untuk Rasul SAW, namun menjadikan dokter tersebut sebagai dokter kaum muslimin dan dokter seluruh rakyat. Pada situasi dan kondisi yang berbeda, Rasul SAW pernah membangun sebuah tempat pengobatan untuk orang-orang sakit dan membiayainmya dengan harta benda dari Baitul Maal.³⁵

Pada kondisi demikian, bila kita berkaca dengan kondisi memberikan jaminan kesehatan kepada rakyat, dimana Negara seakan-akan tidak peduli dan terkesan bahwa berobat hanya merupakan hak bagi orang-orang kaya semata, sementara rakyat yang miskin tidak boleh dan bahkan dilarang untuk sakit. Karena terlihat jelas perbedaan dari kondisi perekonomian antara rakyat berekonomi mampu dan tidak, dimana bagi mereka yang mampu, mereka dapat berobat kapan dan dimana saja, karena mereka memiliki kelebihan harta dan materi. Sementara bagi mereka yang tidak mampu, tidak bisa dan bahkan tidak boleh, karena mereka tidak memiliki harta atau materi untuk membiayai pengobatannya.

Bergitu juga halnya dengan pelayanan Negara secara langsung pada sektor pendidikan, sebagaimana aktivitas Rasul SAW terhadap tawanan Perang Badar, dimana mereka dibebaskan sebagai tawanan ketika mereka mengajarkan baca tulis kepada 10 orang penduduk Madinah.

³⁵ *Ibid.*

Tugas ini menjadi tebusan untuk kebebasan dirinya. Selanjutnya, berkaitan dengan masalah pendidikan ini, sebagaimana kisah tiga orang guru yang mengajar anak-anak. Oleh Khalifah Umar bin Khattab, mereka digaji sebesar 15 dinar setiap bulannya (1 dinar sama dengan 4,25 gram emas).³⁶ Sekiranya 1 gram emas sama dengan Rp. 400.000, maka gaji tiga guru di Madinah pada masa Umar bin Khattab sebesar Rp. 25.500.000,-.

Kondisi demikian, tentunya bertolak belakang dengan fakta pendidikan saat ini, ketika tidak menerapkan sistem politik ekonomi Islam, dimana Negara berlepas tangan dalam masalah tersebut. Terlihat jelas, sektor pendidikan dilakukan privatisasi yang ditandai dengan dilahirkannya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP).³⁷ Dalam undang-undang tersebut, negara menyerahkan sepenuhnya sektor pendidikan kepada swasta atau lembaga pendidikan, sehingga tidak mengherankan, dimana orang tua harus mengeluarkan biaya mahal demi pendidikan anaknya. Kondisi demikian, berakibat fatal bagi individu atau keluarga yang tidak memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, sehingga mereka harus merelakan anak-anaknya untuk tidak sekolah dan memberikan haknya kepada anak-anak yang mampu saja.

Dengan demikian, hanya dengan menerapkan sistem politik ekonomi Islam (PEI) dalam sebuah negara, maka kondisi masyarakat yang pernah terjadi pada masa Nabi SAW dan generasi-generasi setelahnya dapat terwujud pada kondisi sekarang. Sehingga, berbagai kebutuhan yang

³⁶ *Ibid*, h. 293-294.

³⁷ <http://potret-pendidikan-indonesia.com//> diakses pada 2/3/12//

seharus milik masyarakat secara umum mereka nikmati, mereka dapat meraihnya dan merasakannya. Namun, dengan tetap bertahan menerapkan sistem politik ekonomi selain Islam (baik Kapitalisme maupun Sosialisme), maka potret kehidupan umat manusia akan selalu terpuruk dan menyedihkan serta tidak menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi, baik pemenuhan kebutuhan manusia dalam bidang bentuk kebutuhan barang pokok (pangan, sandang, dan papan) yang secara tidak langsung dijamin Negara, atau kebutuhan jasa pokok (keamanan, kesehatan, dan pendidikan), yang secara langsung dipenuhi dan menjadi jaminan bagi Negara dalam memenuhinya.

D. Peran Negara dalam Perekonomian

Pada dasarnya, negara (penguasa) memiliki peran dan tanggung jawab dalam perekonomian. Sejarah mengenai peran yang dilakukan negara dalam bidang ekonomi bisa dilihat antara lain dari sejarah perekonomian.

1. Peran Negara dalam Perekonomian Menurut Sistem Kapitalisme

Menurut Yusanto dan Yunus, bahwa ilmu ekonomi klasik yang mendasarkan diri pada keyakinan akan paham serba-bebas (*laissez faire*) memberikan batasan dan peran yang jelas bagi pelaku ekonomi (masyarakat) dan negara. Dalam hal ini paham *laissez faire* meyakini bahwa memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap individu akan mampu membawa kepada kemakmuran masyarakat.³⁸ Paham *laissez faire*

³⁸ M. Ismail *Op. Cit*, h. 314.

yang berkembang dalam masyarakat barat, merupakan paham yang lahir dari ideologi kapitalisme-dan dasar ideologi tersebut adalah paham kebebasan.

Kemudian, diyakini penganut paham *laissez faire* bahwa tercapainya keseimbangan dalam masyarakat merupakan hasil dari bekerjanya mekanisme pasar, yakni merupakan tarik menarik antara pengguna dengan pemasok, antara kekuatan *demand* (permintaan) dan *supply* (penawaran), antara produsen dan konsumen, antara pihak yang memerlukan dengan pihak yang diperlukan.³⁹

Berdasarkan paham uraian di atas dapat dipahami bahwa paham *laissez faire* memberikan kebebasan sepenuhnya kepada mekanisme pasar dalam melakukan transaksi. Dalam hal ini pemerintah tidak boleh campur tangan (*do nothing*) dalam melakukan intervensi terhadap harga suatu produk. Karena, intervensi yang dilakukan akan menjadi hambatan dari berjalannya mekanisme pasar.

Dengan demikian, peran negara (pemerintah) hanya terjadi dalam bidang-bidang tertentu, dan campur tangan negara tidak secara langsung dan bersifat penuh. Menurut Ismail Yusanto dan Yunus, campur tangan pemerintah hanya terjadi ketika pengaturan atas industri yang memonopoli pasar, mempermudah naik turunnya harga dan menentukan besarnya uang.⁴⁰

³⁹ *Ibid*, h. 315.

⁴⁰ *Ibid*..

2. Peran Negara dalam Perekonomian Menurut Sistem Sosialisme-Komunisme

Berkembangnya paham *laissez faire* di mana memberikan kebebasan kepada mekanisme pasar yang membawa kemelaratan dan kesengsaran bagi masyarakat. Sehingga, antitesa dari paham *laissez faire*, maka muncullah peran negara sebagai pihak yang menentukan perekonomian. Paham ini lahir dari ideologi sosialisme.

Dalam sistem ini, hanya negara yang menguasai faktor produksi yang terdiri dari modal, tanah maupun tenaga kerja. Dalam kebijakan ekonomi, pemerintah akan menentukan jumlah dan jenis barang yang akan diproduksi dalam negeri dan dalam jangka waktu tertentu, begitu juga dalam masalah jumlah dan jenis faktor produksi yang digunakan. Demikian juga penentuan tingkat harga produksi, diawasi secara ketat oleh negara. Karena paham sosialisme, pemerintah menguasai baik rumah tangga maupun dunia usaha. Dengan demikian, negara mengatur produksi dan distribusi barang dan jasa serta distribusi pendapatan.⁴¹

Dari uraian di atas dipahami bahwa paham sosialisme “memindahkan” hak pemilikan dari individu kepada negara. Hal inilah yang mempengaruhi bahwa dalam paham sosialisme hanya mengaku satu konsep kepemilikan, yakni kepemilikan negara (*state property*). Paham dalam ideologi sosialisme kebalikan dari paham kapitalisme, yang juga hanya mengaku satu konsep kepemilikan, yakni kepemilikan individu.

⁴¹ *Ibid..*

Di samping itu, dilihat secara fakta bahwa memberikan kebebasan kepada individu (paham *laissez faire*) mengakibatkan terjadi depresi ekonomi yang memuncak pada tahun 1930-an, yang dikenal dengan *malaisse*. Begitu juga halnya dengan paham yang dianut dalam sistem sosialisme, di mana dalam paham ini tidak memberikan peluang dan kesempatan kepada individu untuk melakukan kreatifitas dalam bidang perekonomian.

3. Peran Negara dalam Perekonomian Menurut Sistem Islam

Dalam perspektif Islam, negara memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Imam Al-Ghazali banyak mengemukakan logika (pendapat), hingga sampai pada kesimpulan berikut ini:

ولهذا قيل: الدين والسلطان توأمان، ولهذا قيل: الدين أسس والسلطان حارس وما لا أسس له فمهدوم وما لا حارس له فضائع

Dari kalimat di atas dapat dipahami bahwa agama dan kekuasaan (Imamah atau Khilafah) adalah dua saudara kembar. Bisa juga disimpulkan, bahwa agama merupakan pondasi, sementara kekuasaan (Imamah atau Khilafah) adalah penjaga. Sesuatu yang tidak mempunyai pondasi, pasti akan roboh. Demikian juga sesuatu yang tidak mempunyai penjaga, juga pasti akan hilang.”

Pernyataan al-Ghazali yang menyatakan, “Berdebat tentang imamah bukanlah perkara penting, juga bukan bidang logika. Ia merupakan bidang fiqih. Masalah ini juga menjadi pemicu terjadinya fanatisme. Orang yang menolak membahasnya lebih selamat, ketimbang

orang yang melibatkan diri di dalamnya. Itupun jika benar, lalu bagaimana kalau membahasnya, ternyata salah?” tidak berarti bahwa masalah Khilafah ini tidak penting. Karena ini bertentangan dengan apa yang beliau uraikan sendiri.

Jadi, konteks pernyataan ini terkait dengan perdebatan yang terjadi di kalangan Ahli Kalam, yang tidak berujung, sehingga akhirnya mengaburkan substansi kewajibannya itu sendiri. Justru al-Ghazali menegaskan, bahwa menegakkan Khilafah ini merupakan kewajiban sangat penting, hingga sampai pada kesimpulan, bahwa “Agama dan kekuasaan (Imamah atau Khilafah) adalah dua saudara kembar.” Juga, kesimpulan, bahwa “Agama merupakan pondasi, sementara kekuasaan (Imamah atau Khilafah) adalah penjaga. Sesuatu yang tidak mempunyai pondasi, pasti akan roboh. Demikian juga sesuatu yang tidak mempunyai penjaga, juga pasti akan hilang.”⁴²

Sementara menurut Ibnu Taimiyyah, Negara dan kepemimpinan Negara adalah sebagai sebuah kewajiban Islam. Mengatur segala urusan masyarakat adalah suatu kewajiban. Hal itu tidak dapat dibangun tanpa institusi Negara yang baik. Banyak sekali perkara yang menjadi kewajiban seluruh Muslim tidak dapat dilakukan tanpa institusi Negara, karena membutuhkan kekuatan, pengorganisasian dan kewenangan. Jihad dan penegakan hukum tidak dapat ditangani dengan baik tanpa melibatkan peran dan kekuasaan Negara.⁴³

⁴² Wwww.al-khilafah .org

⁴³ A.A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 215-216.

Pentingnya peran negara dalam perekonomian dapat dilihat dari sepuluh daftar kewajiban negara (khalifah) menurut Imam al-Mawardi, sebagai berikut:

- a. Menjaga tegaknya keimanan (akidah Islamiyyah) masyarakat dengan mencegah masuknya pemikiran kufur di tengah mereka
- b. Melaksanakan dan menjaga keadilan
- c. Menjamin keamanan kehidupan dan hak milik warga di bawah pemerintahannya
- d. Mengawasi pelaksanaan hukuman (*uqubat*)
- e. Melaksanakan garis perbatasan yang layak dan dengan kekuatan cukup
- f. Mengorganisasi jihad dalam melawan siapa saja yang menolak ajaran Islam tentang keadilan
- g. Mengorganisasi barang rampasan dan orang-orang miskin, menurut petunjuk syariah
- h. Menyehatkan keuangan pemerintah
- i. Memilih orang-orang untuk menjadi pejabat hokum berdasar seleksi kompetensi dan loyalitasnya
- j. Melakukan pengawasan langsung terhadap urusan publik.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas ditarik benang merah bahwa negara berperan dan bertanggung jawab dalam aktivitas perekonomian. Berbagai aktivitas perekonomian yang menjadi tanggung jawab negara dioptimalisasikan ke dalam tiga fungsi negara, yaitu (a) fungsi alokatif, (b) fungsi distributif, dan (c) fungsi stabilitas.

⁴⁴ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaaniyah*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973), hlm. 15-16.

a. Fungsi Alokatif

Fungsi alokatif adalah negara mengalokasikan anggarannya dengan tujuan menyediakan secara memadai barang-barang kepemilikan publik kepada masyarakat. Tanggung jawab penyediaan barang-barang publik ini diserahkan kepada Negara, karena sangat dibutuhkan publik. Negara tidak akan pernah membiarkan sumber daya alam dimiliki oleh individu, apalagi dijual kepada pihak asing. Barang tambang baik yang strategis, vital atau yang tidak termasuk keduanya, semuanya dikelola oleh Negara dengan sebaik-baiknya.⁴⁵

Dalam hal ini Negara harus menyelenggarakan manajemen yang baik, termasuk dengan mempersiapkan sumber daya manusia dan tenaga ahli di kalangan kaum muslimin yang cakap dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Negara dapat melaksanakan pelatihan dan studi keahlian, jika dibutuhkan melibatkan pihak luar yang dinilai layak dalam memberikan pelatihan tersebut, dengan dana yang disediakan oleh Negara. Kemudian, Negara juga dapat melakukan transfer teknologi atau pembelian teknologi jika memang-memang benar akan membuat optimalisasi pemenuhan kebutuhan publik.

b. Fungsi Distributif

Fungsi distributif ditujukan untuk mensirkulasikan kekayaan kepada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan harta pada segelintir orang. Adanya fungsi distributif dalam

⁴⁵ <http://jurnal-ekonomi/fungsi-negara-dalam-Islam//04/05/2012//>

Negara, karena Islam menilai bahwa permasalahan utama dalam ekonomi adalah tidak lancarnya distribusi di masyarakat. Distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat⁴⁶.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa distribusi merupakan salah satu kegiatan dalam ekonomi dan perlu mendapat perhatian serius. Namun, pemahaman demikian berbeda bila dilihat menurut ekonomi Kapitalisme, bahwa faktor distribusi bukanlah suatu faktor yang mengakibatkan timbulnya masalah ekonomi di masyarakat, melainkan faktor produksi, sebagaimana yang diungkapkan: “inti permasalahan ekonomi terletak pada produksi.

Dengan demikian, para ekonom kapitalis berpendapat bahwa penyebab kemiskinan (ketidak-cukupan) adalah kurangnya atau langkanya atau terbatasnya (*limited*) barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas (*unlimited*) dan beraneka ragam. Untuk mengatasi persoalan tersebut, manusia perlu bekerja keras memproduksi sebanyak-banyaknya alat pemuas kebutuhannya itu. Untuk menghilangkan *gap* ini, harus dengan cara meningkatkan produksi sampai titik maksimum”⁴⁷.

Dari pendapat di atas, hal ini yang menjadikan hitungan angka rata-rata statistik (hitung kolektif) seperti GDP (*Gross Domestic Product*) dan GNP (*Gross National Product*) adalah persoalan penting

⁴⁶ Dessy Anwar, *Op. Cit*, h. 125.

⁴⁷ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Diterjemahkan oleh M. Irfan Syofwani, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), h. 286.

bagi mereka; tanpa melihat orang per orang, apakah mereka sejahtera atau tidak. Karena yang diperhatikan adalah jumlah total produk nasional suatu negara.

Dalam perspektif ekonomi Islam, di mana pendapat di atas sangat keliru. Menurut sistem ekonomi Islam, inti masalah ekonomi bukanlah kekurangan produksi, melainkan adalah masalah distribusi. Sebagaimana dikemukakan oleh al-Maliki: “persoalan ekonomi bukanlah kekurangan sumber daya alam (*resources*) yang tersedia, karena sumber daya itu cukup disediakan oleh Allah SWT (QS. Hud [11]: 6), tetapi terletak pada cara mendistribusikan sumber daya itu kepada seluruh manusia. Sebab, sebanyak apa pun barang dan jasa yang tersedia, tanpa adanya pola distribusi yang tepat, dan pembatasan konsumsi, tetap akan timbul masalah kekurangan bagi yang lain”⁴⁸ Dengan demikian, makna distribusi dalam ekonomi Islam sangatlah luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan⁴⁹.

Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan masing-masingnya kaidah-kaidah untuk mendapatkan dan mempergunakannya, dan kaidah-kaidah untuk *warisan*, *hibah* dan *wasiat*. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan, baik antar unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya, dan pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam.

⁴⁸ Abdurrahman al-Maliki, *Op. Cit*, h. 19.

⁴⁹ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Op. Cit*, h. 125.

c. Fungsi Stabilitatif

Fungsi stabilitatif bagi negara, di mana Negara melakukan tindakan-tindakan antisipasi terhadap instabilitas ekonomi. ancaman dan intervensi asing tidak akan ditoleransi oleh Negara. Dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa besar dan kemandirian ekonomi Negara, maka ancaman sabotase dan boikot ekonomi pihak asing tidak akan berarti. Perekonomian yang kuat akan menjadikan Negara mampu membiayai infrastruktur pertahanan dan keamanan Negara hingga perlengkapan industri dan militer yang mendukungnya. Alhasil, Negara tidak akan gentar sedikitpun terhadap ancaman invasi militer pihak asing.⁵⁰

Dari tiga fungsi di atas, menurut M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus ada beberapa peran dan kebijakan negara (khalifah) dalam bidang perekonomian, yaitu; (1) Menyusun kebijakan dan perencanaan ekonomi, (2) Pengelolaan hak milik umum dan Negara, (3) Menjaga mekanisme pasar, dan (4) Pengawasan dan penghukuman kejahatan ekonomi.⁵¹

Berdasarkan uraian di atas terlihat jelas peran negara dalam perekonomian baik dalam perspektif sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme dan Islam. Dari ketiga sistem tersebut terlihat perbedaan mendasar antara peran negara dalam perekonomian, dan perbedaan tersebut disebabkan dasar pijakan (asas) dan tujuan yang ingin dicapai dari masing-masing ideologi atau sistem tersebut, yakni kapitalisme, sosialisme dan Islam.

⁵⁰ Majalah Media Politik dan Dakwah-Mengembangkan Kekayaan Milik Rakyat, No. 77 Edisi Ke-VII, Tahun 2007, hlm. 18.

⁵¹ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Op. Cit*, hlm. 320-325.

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Politik Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil kajian dari pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang Politik Ekonomi Islam (PEI), sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pengertian Politik Ekonomi Islam

Dalam merumuskan pengertian tentang politik ekonomi Islam, Taqiyuddin An-Nabhani memaparkan pengertian politik ekonomi dalam pengertian umum. Hal ini demikian sebagaimana ungkapan beliau, dari kalimat berikut, adalah:

هِيَ الْهَدَفُ الَّذِي تَرْمِي إِلَيْهِ الْأَحْكَامُ الَّتِي تُعَالِجُ تَدْبِيرُ أُمُورِ الْإِنْسَانِ

Adalah tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum yang dipergunakan untuk memecahkan mekanisme pengaturan berbagai urusan manusia.¹

Dari pengertian politik ekonomi yang diungkapkan oleh Taqiyuddin An-Nabhani di atas, dapat dipahami bahwa politik ekonomi merupakan suatu strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam memecahkan mekanisme pengaturan berbagai urusan manusia. Yang dimaksud dengan hukum-hukum di atas, adalah hukum-hukum ekonomi. Sementara yang dimaksud dengan urusan manusia adalah berbagai kebutuhan yang seharusnya dimiliki oleh manusia, berupa kebutuhan

¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizham al-Iqtishodi fi al-Islam*, (Beirut: Darul Ummah, 1425 H/ 2004 M), h. 60.

pokok (berupa pangan, sandang, papan, keamanan, kesehatan dan pendidikan). Pengertian politik ekonomi di atas dijelaskan lebih lanjut dan mendasar dalam pandangan Islam, adalah:

هِيَ ضَمَانُ تَحْقِيقِ الْإِشْبَاعِ لِجَمِيعِ الْحَاجَاتِ الْأَسَاسِيَّةِ لِكُلِّ فَرْدٍ إِشْبَاعًا كُلِّيًّا، وَتَمَكِينُهُ مِنْ إِشْبَاعِ الْحَاجَاتِ الْكَمَالِيَّةِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَطِيعُ، بِإِعْتِبَارِهِ يَعْشُ فِي مُجْتَمَعٍ مُعَيَّنٍ، لَهُ طَرَأٌ خَاصٌّ مِنَ الْعَيْشِ، فَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى كُلِّ فَرْدٍ بَعَيْنِهِ، لَا إِلَى مَجْمُوعِ الْأَفْرَادِ الَّذِينَ يَعْشُونَ فِي الْبِلَادِ

Menjamin terealisasinya pemenuhan semua kebutuhan primer (basic needs) setiap orang secara menyeluruh, berikut kemungkinan dirinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya, sesuai dengan kadar kesanggupannya sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup (life style) tertentu.²

Berdasarkan pengertian di atas, ada tiga bentuk kebutuhan manusia yang harus diraih oleh individu, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Namun, dari ketiga bentuk kebutuhan tersebut, ada yang dijamin pemenuhannya oleh Negara dan ada juga individu yang bersangkutan diberikan kesempatan atau peluang untuk meraih kebutuhan tersebut, sesuai kadar dan kemampuan yang dimiliki masing-masing, dengan ketentuan kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang dibenarkan dan dibolehkan menurut syara'.

Adapun jenis kebutuhan yang dijamin Negara berupa kebutuhan pokok, seperti pangan, sandang, papan, keamanan, kesehatan dan pendidikan. Sementara kebutuhan yang secara peluang dan kesempatan diberikan Negara kepada individu, berupa kebutuhan sekunder dan tersier. Dari sini jelas, secara umum Negara bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan dari setiap warga Negeranya secara menyeluruh tanpa terkecuali (baik Muslim maupun non-Muslim).

² *Ibid.*

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, tanggung jawan Negara dalam menjamin, merealisasi dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat karena Islam memandang setiap secara pribadi, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah Negara, sebagaimana ungkapan berikut:

هُوَ يَنْظُرُ إِلَى كُلِّ فَرْدٍ بَعَيْنِهِ، لَا إِلَى مَجْمُوعِ الْأَفْرَادِ الَّذِينَ يَعْشُونَ فِي الْبِلَادِ. وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ بِإِعْتِبَارِهِ إِنْسَانًا أَوَّلًا لِأَبْدٍ مِنْ إِشْبَاعِ جَمِيعِ حَاجَاتِهِ الْأَسَاسِيَّةِ إِشْبَاعًا كُلِّيًّا، ثُمَّ بِإِعْتِبَارِ فَرْدِيَّتِهِ الْمَشْخُصَةِ ثَانِيًا بِتَمَكُّينِهِ مِنْ إِشْبَاعِ حَاجَاتِهِ الْكَمَالِيَّةِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَطِيعُ. وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ بِإِعْتِبَارِهِ مُرْتَبِطًا مَعَ غَيْرِهِ بِعَلَاقَاتٍ مَعِينَةٍ، تَسِيرُ تَسِيرًا مَعِينًا حَسَبَ طَرَاظٍ خَاصِّ

Islam memandang, setiap orang secara pribadi, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah Negara. Pertama Islam memandang setiap orang sebagai manusia yang harus dipenuhi semua kebutuhan primernya secara menyeluruh. Berikutnya baru memandang manusia dengan kapasitas pribadinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar kemampuannya. Kemudian pada saat yang sama, Islam memandang manusia sebagai orang yang terikat dengan sesamanya dalam interaksi tertentu, yang dilaksanakan dengan mekanisme tertentu, sesuai dengan gaya hidup tertentu pula.³

Dari ungkapan di atas, maka dapat dipahami bahwa, Islam memandang manusia dalam tiga perspektif, (1) Manusia yang harus dipenuhi semua kebutuhannya (berupa kebutuhan primer), (2) Manusia sesuai kapasitas yang dimiliki dalam rangka meraih kebutuhan sekunder dan tersier, dan (3) Manusia yang memiliki keterikatan dengan manusia lain dalam melakukan interaksi, dan diatur dengan mekanisme tertentu (sesuai Islam).

³ Ibid,

Maka, dari tiga perspektif di atas Islam sangat memperhatikan dan peduli serta bertanggung jawab dengan kebutuhan individu. Dalam hal ini, Islam memandang kepedulian dan tanggung jawab tersebut merupakan peran dari Negara. Dan Negara-lah yang bertanggung jawab atas semuanya, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴

2. Tujuan Politik Ekonomi Islam

Dalam membahas tujuan dari pelaksanaan politik ekonomi Islam, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani membandingkannya dengan sistem politik ekonomi di luar Islam. Dengan melakukan perbandingan tersebut, maka terlihat jelas perbedaan antara keduanya. Hal ini terlihat jelas dalam ungkapan beliau, sebagai berikut:

فالإسلام في الذي يشرع الأحكام الإقتصاد للإنسان يجعل التشريع موجهًا للفرد. وفي الوقت الذي يعمل لضمان حق العيش، والتأمين الرفاهية، يجعل ذلك يتحقق في مجتمع معين، له طراز خاص من العيش

*Politik ekonomi Islam, bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah Negara semata, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya setiap orang untuk menikmati kehidupan tersebut. Politik ekonomi Islam juga bukan hanya bertujuan untuk mengupayakan kemakmuran individu dengan membiarkan mereka sebebaskan-bebasnya untuk memperoleh kemakmuran tersebut dengan cara apapun, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya hak hidup seseorang.*⁵

Dari uraian di atas diketahui bahwa menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani politik ekonomi Islam, bertujuan untuk yaitu:

- a. Memecahkan masalah utama yang dihadapi setiap orang sebagai manusia yang hidup sesuai dengan interaksi-interaksi tertentu

⁴ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 287.

⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizham al-Iqtishodi fi al-Islam*, loc.cit.

- b. Mendorong setiap orang untuk meningkatkan taraf hidupnya
- c. Mengupayakan kemakmuran bagi dirinya di dalam gaya hidup tertentu.

Dari perbandingan antara sistem politik ekonomi Islam dengan selain Islam menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani pada uraian di atas, maka terlihat sekali perbedaan mendasar antara kedua sistem politik tersebut. Adapun perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari aspek:

a. Standar Kesejahteraan

Sistem politik di luar Islam, terpenuhi tidaknya suatu kebutuhan secara kolektif (lingkup Negara). Dalam konteks ekonomi modern menggunakan istilah GNP (*Gross National Product*) atau pendapatan nasional, sementara sistem politik Islam, standar sejahtera atau tidaknya seseorang dilihat secara person atau individu dalam suatu Negara.

Bila ditelusuri dari perbedaan tersebut, dipengaruhi cara pandang dari dua sistem di atas mengenai individu dan jemaah (masyarakat). Islam dalam memandang posisi antara individu dengan masyarakat merupakan satu kesatuan yang integral yang keduanya sama-sama pada posisi selaku makhluk ciptaan Allah SWT dan memiliki kesadaran akan hubungannya dengan Khaliq-Allah SWT. Sementara dalam sistem Kapitalisme memandang antara masyarakat dan individu, dimana masyarakat terbentuk dari individu. Adapun sosialisme berpandangan bahwa individu dan masyarakat (jemaah) yang merupakan bagian dari alam.⁶

⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizhamu Al-Islam*, Diterjemahkan oleh Abu Amin, dkk dengan judul *Peraturan Hidup Dalam Islam*, (Bogor: Al-Izzah, 2005), h. 43-44, 47.

b. Peluang dan Kesempatan yang dimiliki

Sistem politik di luar Islam hanya memberikan peluang dan kesempatan kepada individu saja dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pada aspek ini, akan melahirkan dampak negatif berupa kesenjangan sosial di tengah masyarakat antara individu yang memiliki kekayaan dengan yang miskin. Berbeda halnya dengan sistem politik ekonomi Islam, dimana memberikan kesempatan kepada setiap orang tanpa terkecuali (baik Muslim maupun non-Muslim) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Target dan Sasaran

Pada aspek ini, yang menjadi target pemenuhan kebutuhan dalam sistem politik ekonomi di luar Islam adalah jemaah atau komunitas, sementara dalam sistem Islam individu secara menyeluruh.

d. Tolak Ukur Perbuatan

Sistem politik ekonomi di luar Islam, tolak ukur dari perbuatan adalah azas manfaat, dimana memberikan kebebasan sebebaskan mungkin kepada individu untuk meraih kesejahteraan dan kebahagiaan tanpa mekanisme tertentu, sementara dalam sistem politik ekonomi Islam juga memberikan kesempatan kepada individu untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan, tetapi mereka diatur dengan mekanisme tertentu (yang bersifat khas) yaitu berdasarkan Islam.

Adapun perbedaan mendasar dalam menetapkan tolak ukur dari perbuatan, dimana sistem di luar Islam menjadikan “sekularisme” dan “evolusi materi atau dialektika materialism” sebagai dasar, sehingga

menghasilkan manfaat sebagai tujuan dalam mencapai kebahagiaan hidup, sementara Islam senantiasa selalau menjadikan aqidah Islam sebagai dasar dan mekanisme dalam mengatur kehidupan.⁷

3. Mekanisme Pemenuhan Kebutuhan

Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, strategi yang digunakan dalam sistem politik ekonomi Islam, dimana mewajibkan kepada laki-laki yang mampu untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Ketika individu tersebut tidak mampu, bekerja, maka Islam mewajibkan kepada anaknya serta ahli warisnya untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, ketika individu, keluarga atau ahli warisnya juga tidak mampu, maka Negaralah yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan tersebut dengan mengambilnya dari kas Baitul Maal. Hal demikian, sebagaimana dalam kalimat berikut:

ولذلك تجد الأكام الشرعية قد ضمنت توفير إشباع جميع الحاجات الأساسية إشباعاً كلياً لكل فردٍ من أفراد رعيّة الدولة الإسلامية، من مأكل وملبس ومسكن. وذلك بفرض العمل على الرجل القادر، حتى يوقّر لنفسه الحاجات الأساسية له ولمن تجب عليه نفقتهم. وفرضها على المولود له، وعلى الوارث إن لم يكن قادر على العمل. أو على بيت المال إن لم يوجد من تجب عليهم نفقته. وذلك بفرض العمل على الرجل القادر، حتى يوقّر لنفسه الحاجات الأساسية له ولمن تجب عليه نفقتهم. وفرضها على المولود له، وعلى الوارث إن لم يكن قادر على العمل. أو على بيت المال إن لم يوجد من تجب عليهم نفقته

“Karena itu, hukum-hukum syariah telah menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan primer setiap warga Negara Islam secara menyeluruh seperti sandang, pangan, dan papan. Caranya adalah dengan mewajibkan setiap laki-laki yang mampu untuk bekerja agar dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya

⁷ Ibid,

*sendiri, berikut kebutuhan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya. Kalau orang tersebut sudah tidak mampu bekerja, maka Islam mewajibkan kepada anak-anaknya serta ahli warisnya untuk bekerja. Jika yang menanggung tidak ada, maka Baitul Maal-lah yang wajib memenuhinya”.*⁸

Dari ungkapan di atas, maka diketahui bahwa ada tiga pihak yang dibebankan dan menjamin agar terpenuhi kebutuhan hidup seseorang, yaitu (1) individu, (2) keluarga atau kerabat atau ahli waris, dan (3) Negara. Pihak-pihak yang menjamin terpenuhi kebutuhan seseorang, sesuai susunan atau tingkatannya. Jaminan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan primer berupa pangan, sandang, dan papan. Sementara kebutuhan-kebutuhan lainnya tidak, seperti kebutuhan sekunder dan tersier. Karena kebutuhan sekunder dan tersier, sesuai kadar kemampuan seseorang dalam memenuhinya dan diatur sesuai mekanisme tertentu pula, sebagaimana dalam ungkapan berikut:

ثُمَّ حَتَّ هَذَا الْفَرْدُ عَلَى التَّمَتُّعِ بِالطَّيِّبَاتِ، وَالْأَخْذُ مِنْ زِينَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا يَسْتَطِيعُ. وَمَنْعَ الدَّوْلَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ ضَرَائِبَ، مِمَّا هُوَ فَرَضٌ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا مِمَّا يَزِيدُ عَلَى كِفَايَةِ حَاجَاتِهِ، الَّتِي يَشْبَعُهَا فِعْلًا فِي حَيَاتِهِ الْعَادِيَةِ، وَلَوْ كَانَتْ حَاجَاتُ كَمَالِيَّةٍ

*Islam mendorong manusia agar bisa menikmati rezki yang baik (halal) serta mengambil hiasan hidup di dunia sesuai dengan kemampuannya. Islam melarang negara untuk mengambil harta orang tersebut sebagai pajak-meski hal itu merupakan kewajiban seluruh kaum Muslimin, selain dari sisa pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, yang memang dia penuhi secara langsung dalam standar hidupnya, yang memang dia penuhi secara langsung dalam standar hidup yang wajar, meskipun hal itu merupakan kebutuhan sekunder atau tersiernya.*⁹

⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizham al-Iqtishodi fi al-Islam*, op.cit, h. 61.

⁹ *Ibid*,

Dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa Islam memberikan kesempatan atau peluang kepada seseorang untuk memperoleh kebutuhan sekunder dan tersier, setelah mereka mampu memenuhi kebutuhan pokok (*basec need*) untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Di sisi lain, Islam tidak mengambil pajak dari sesuatu yang mereka miliki (berupa kebutuhan primer). Dalam hal ini Islam membolehkan mengambil sesuatu (harta) berupa sekunder dan tersier. Dengan demikian, dapat juga dipahami bahwa tidak kewajiban pajak dalam hubungan dengan kebutuhan pokok. Kondisi demikian berbeda dengan yang terjadi saat ini, dimana Negara mewajibkan pajak dalam sesuatu dalam hubungannya dengan kebutuhan pokok, seperti kewajiban Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan sejenisnya.

Selanjutnya, menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, dimana Islam telah menjamin terpenuhinya hak hidup seseorang secara pribadi serta memberikan kesempatan kepadanya untuk memperoleh kemakmuran hidupnya. Kemudian, pada saat yang sama, Islam telah menentukan perolehan harta individu tersebut, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersiernya dengan ketentuan tertentu, sekaligus menjadikan interaksi orang tersebut sebagai interaksi yang mengikuti gaya hidup yang khas pula.

Dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa sistem politik ekonomi Islam juga mengatur dalam masalah kepemilikan terutama kepemilikan individu. Di sisi lain, kewajiban bekerja bagi laki-laki yang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan salah satu sebab terjadinya kepemilikan di antaranya kepemilikan pribadi (*private*

propherty). Maka dari itu, Islam telah menetapkan mekanisme tertentu dalam mendapatkan berbagai kebutuhan hidup harus selalu terikat kepada ketentuan syara', seperti mengharamkan setiap muslim untuk memproduksi dan mengkonsumsi minuman keras, melarang praktek ribawi, adanya mekanisme pemanfaatan kekayaan yang dimiliki kepada masyarakat lain, sebagaimana diungkapkan dalam kalimat berikut:

فَحَرَّمَ إِنْتَاجَ الْخَمْرِ وَإِسْتِلَاكِهَا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يَعتَبِرْهَا بِالنَّسْبَةِ لَهُ مَادَّةُ إِقْتِصَادِيَّةٍ. وَحَرَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَالتَّعَامَلَ بِهِ عَلَى كُلِّ يَحْمِلُونَ التَّابِعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ، وَلَمْ يَعتَبِرْهَا بِالنَّسْبَةِ لَهُمْ مَادَّةُ إِقْتِصَادِيَّةٍ، سِوَاءُ أَكَاثُ مُسْلِمِينَ أَمْ غَيْرِ مُسْلِمٍ، فَجَعَلَ الْوَضْعَ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الْمُجْتَمَعُ حِينَ الْإِنْتِفَاعِ بِالْمَالِ أَمْرًا أُسَاسِيًّا عِنْدَ الْإِنْتِفَاعِ بِالمَادَّةِ الْإِقْتِصَادِيَّةِ

*“Islam mengharamkan setiap Muslim untuk memproduksi dan mengkonsumsi minuman keras. Bahkan dalam kaitannya dengan seorang Muslim, tidak pernah menganggap minuman keras sebagai barang ekonomi. Islam juga mengharamkan riba, termasuk berhubungan dengan riba, bagi siapa saja yang memiliki kewargangeraan Islam. Bahkan dalam hubungannya dengan mereka, Islam tidak menganggap riba sebagai barang ekonomi, baik mereka Muslim maupun non-Muslim. Karena itu, Islam telah menjadikan hal-hal yang dituntut oleh masyarakat ketika memanfaatkan harta kekayaan tersebut, sebagai masalah utama yang harus diperhatikan, ketika memanfaatkan barang-barang ekonomi tersebut”.*¹⁰

Berdasarkan pada ungkapan di atas, dipahami bahwa terkait mekanisme bagi seseorang dalam memperoleh kebutuhan hidup dalam pandangan Islam, hal ini tidak hanya berlaku bagi seorang Muslim saja dalam suatu Negara, melainkan berlaku bagi setiap warga Negara (baik Muslim maupun non-Muslim). Mereka harus terikat dan senantiasa selalu menjadikan mekanisme yang telah ditetapkan dan ditentukan Islam terkait dalam memperoleh dan mendapatkan kekayaan (kepemilikan pribadi).

¹⁰ Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizhaamu al-Iqtishodi fi al-Islam*, op.cit, h. 61-62.

Dari yang diungkapkan diatas, dapat juga dipahami bahwa Islam tidak memisahkan orang dari kedudukannya sebagai manusia, juga tidak memisahkan dirinya sebagai manusia dari pribadinya sendiri. Kemudian, Islam juga tidak pernah memisahkan anggapan tentang jaminan pemenuhan kebutuhan primer yang dituntut oleh masyarakat dari masalah mungkin tidaknya terpenuhi kebutuhan sekunder dan tersier mereka. Akan tetapi, Islam telah menjadikan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut dan apa yang dituntut oleh masyarakat sebagai dua hal yang seiring, yang tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. Justeru Islam menjadikan apa yang dituntut oleh masyarakat tersebut sebagai asa (dasar pijakan) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada.

4. Konsep Kepemilikan

Sistem politik ekonomi Islam memiliki dan mengatur mekanisme kepemilikan yang khas dan unik, hal inilah yang membedakannya dengan konsep kepemilikan di luar Islam (Kapitalisme dan Sosialisme). yaitu: (a) Kepemilikan individu, (2) Kepemilikan umum, dan (3) Kepemilikan Negara.¹¹

Dalam kaitannya memberikan jaminan kepada seseorang untuk meraih kebutuhan hidup (berupa kebutuhan primer) dan memberikan kesempatan kepada individu untuk meraih kebutuhan sekunder dan tersier, Islam menetapkan sebab-sebab kepemilikan serta akad-akad (transaksi-

¹¹ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 125.

transaksi) yang digunakan untuk melangsungkan pertukaran hak milik, Kemudian, beberapa sebab dari kepemilikan individu, di antaranya bekerja. Dalam hal ini Islam membiarkan manusia untuk bekerja asalkan halal baik sebagai tukang kayu, tukang sepatu, buruh, petani, dan lain sebagainya.

فشرع العمل وبيّن أحكامه، وترك للإنسان أن يعمل نجارًا وحدّاء وصانعًا وزارعًا وغير ذلك، وجعل الهدية وجه بحيث تقاس عليها عطية مثلاً في جعلها سبباً للملك، وجعل إجارة على حال بحيث تقاس عليها الوكالة مثلاً في إستحقاق أجره الوكيل

“Islam telah mensyariatkan manusia bekerja sekaligus menjelaskan hukum-hukumnya. Bahkan Islam telah membiarkan manusia bekerja asalkan halal, baik sebagai tukang kayu, tukang sepatu, buruh, petani, maupun yang lain. Islam telah menjadikan hadiah, di satu sisi dianalogkan pada, misalnya pemberian, dengan menjadikan ijarah (akad kontrak jasa), dalam satu kondisi dianalogkan pada, misalnya wakalah (akad perwakilan), yaitu hak seorang wakil untuk memperoleh upah”¹²

Dari penggalan pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa Islam membolehkan segala bentuk pekerjaan, dan menjadikannya sebagai sebab-sebab kepemilikan individu (*private property*) selama pekerjaan tersebut dibenarkan syara’ berupa usaha yang halal dan benar-benar bersih. Adapun sebab kepemilikan individu dapat disebabkan melalui proses usaha sendiri (barang maupun jasa), seperti menjadi tukang kayu, pedagang, makelar, atau disebabkan karena hadiah dari seseorang, dan semisalnya.

Kemudian, karena Negara melalui Baitul Maal bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan bagi seluruh rakyat, seperti pemeliharaan bagi orang lemah, berbagai fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan sebagainya,

¹² Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizhamu al-Iqtishodi fi al-Islam*, op.cit, h. 64.

maka Negara diberikan kekuasaan oleh Syara' untuk memungut harta kekayaan tertentu sebagai kebutuhan tetap, berupa *jizyah* dan *kharaj*. Hal dapat diketahui dari penggalan kata berikut:

وَمَنْ أَجَلٍ أَنْ تَقُومَ الدَّوْلَةُ بِمَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ عَلَيْهَا، جَعَلَ لَهَا سُلْطَةً جَبَايَةِ أَمْوَالٍ مَعَيَّنَةٍ جَبَايَةِ دَائِمِيَةٍ كَالْجَزْيَةِ وَالْخَرَاجِ، وَأَمْوَالِ الزَّكَاةِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَجَعَلَ لَهَا حَقَّ جَبَايَةٍ مَا هُوَ فَرَضٌ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، كِإِصْلَاحِ الطَّرِيقِ، وَبِنَاءِ الْمُسْتَشْفَيَاتِ، وَإِطْعَامِ الْجَائِعِينَ، وَمَاشِكِلِ ذَلِكَ

*“Agar Negara bisa melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh syariah, syariah telah memberikan kekuasaan kepada Negara untuk memungut harta kekayaan tertentu sebagai pungutan tetap, semisal jizyah dan kharaj. Syariah juga telah menjadikan hasil zakat sebagai bagian harta Baitul Maal. Syariah pun telah memberikan kewenangan kepada Negara untuk memungut harta yang telah diwajibkan atas seluruh kaum Muslimin, semisal untuk perbaikan jalan, pembangunan rumah sakit, memberi makan orang-orang yang kelaparan dan lain-lain”.*¹³

Dari pandangan yang dikemukakan Syekh Taqiuddin An-Nabhani di atas, dapat dipahami bahwa dalam kaitannya Negara melalui Baitul Maal menjamin kebutuhan hidup warga Negara, maka Baitul Maal diberikan hak oleh Syara' untuk memungut harta yang menjadi *income* tetap, seperti *jizyah*, *kharaj* dan sejenisnya.

Dari kutipan di atas, dapat juga dipahami bahwa beberapa hak yang diberikan syara' kepada Negara sebagai pemasukan tetap dalam menjalankan fungsinya melayani umat, hal ini menjadi sebab-sebab dari kepemilikan Negara dan berbagai sebab lain yang menjadi milik Negara. Meskipun dalam ungkapan di atas, Syekh An-Nabhani tidak menjelaskan hal ini sebagai bentuk dari kepemilikan Negara, akan tetapi beberapa hak yang diberikan Syara' kepada Negara dalam mengelola kepemilikan Negara, dimana bentuk-bentuk kepemilikan di atas, tidak termasuk dalam kategori kepemilikan individu dan umum.

¹³ *Ibid*, h. 65.

Adapun berkaitan dengan konsep kepemilikan umum, dapat diketahui sebagai berikut:

وهذه الملكية العامة من بترول وحديد ونحاس وماشكل ذلك أموال لا بدّ من إستغلالها وتنميتها، لتحقيق التقدّم الإقتصادية للأمة، لأنّ هذه الأموال الأمة، والدولة تتولاها لتنميتها وإدارتها

*“Kepemilikan umum (collective property) semisal minyak, tambang besi, tembaga dan sebagainya adalah kekayaan yang harus dieksplorasi dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan kemajuan taraf perekonomian umat. Sebab kekayaan tersebut milik umat. Sementara Negara memiliki otoritas untuk mengembangkan dan mengolalanya”.*¹⁴

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, dapat diketahui beberapa bentuk kepemilikan umum, seperti minyak bumi, tambang emas, tembaga dan sebagainya. Namun, lebih jelasnya pembahasan tentang kepemilikan baik individu, Negara maupun umum telah dibahas oleh beliau dalam bab khusus.

Di samping itu, dari uraian tentang konsep kepemilikan dalam yang mekanismenya diatur dalam sistem politik ekonomi Islam sebagaimana diuraikan di atas, maka jelaslah perbedaan antara bentuk kepemilikan yang ada dalam sistem politik ekonomi Islam. Hanya saja dari berbagai bentuk atau konsep kepemilikan yang diperbolehkan syara’ bagi Negara untuk mengelolanya, semata-mata untuk menjamin terpenuhinya berbagai kebutuhan hidup manusia.

Dengan demikian, tampaklah bahwa politik ekonomi Islam telah dibangun dengan berpijak pada asas pemenuhan kebutuhan setiap orang sebagai individu yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu, serta asas

¹⁴ Ibid.

bekerja untuk mendapatkan kekayaan dalam rangka memenuhi apa saja yang bisa memuaskan kebutuhan. Karena itu, politik ekonomi Islam tersebut sebenarnya berdiri di atas satu konsep, yaitu menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan hukum syari'ah yang diterapkan oleh setiap orang dengan dorongan ketakwaan kepada Allah SWT serta dilaksanakan oleh Negara, melalui pembinaan dan pengundang-undangan hukum syariah.

B. Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Politik Ekonomi Islam

Telah dijelaskan dalam bab I pada bagian metode penelitian, bahwa penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan, di antaranya menelaah buku-buku yang merupakan hasil dari pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang politik ekonomi. Dalam hal ini penulis mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (konten analisis) yaitu mempelajari pesan-pesan yang ada diberbagai literatur mulai dari kosa kata, pola kalimat dan latar belakang situasi.

Adapun alasan penulis menggunakan analisis isi (konten analisis), karena penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan, yakni mengkaji pemikiran tokoh atau pemikir, Kemudian, digunakan analisis isi (konten isi) karena data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data sekunder, yakni pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang politik ekonomi Islam; yang secara spesifik dikaji dari buku karya beliau yang berjudul “*nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islam*”.

Dalam menganalisis pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang politik ekonomi Islam, penulis selalu menjadikan hukum syara’ (aturan syariah dalam berekonomi) sebagai dasar dalam menganalisis pemikiran tersebut.

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu “*greek*” memiliki makna mengurus urusan rumah tangga. Di dalamnya anggota keluarga yang mampu ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa. Sementara ilmu ekonomi menurut Muhammad Quraish Shihab yang dikutip Muhammad Said adalah sebagai ilmu mengetahui perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan uang dan membelajakannya.¹⁵

Adapun pengertian ekonomi Islam dapat dilihat dari pengertian yang dikemukakan para ahli, sebagai berikut:¹⁶

1. Abdul Manan, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
2. S.M. Hasanuzzaman, ekonomi Islam adalah pengetahuan atau penerapan perintah-perintah dan tatacara yang ditetapkan oleh syari’ah dengan tujuan mencegah ketidakadilan dalam penggalan dan penggunaan sumber daya material, guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.
3. Ahmad Muhammad al-Assal, dk; ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur’an dan as-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya.

¹⁵ Muh. Said HM, *Pengantar Ekonomi Islam: Dasar-Dasar dan Pengembangannya*, (Pekanbaru: Susqa Press, 2008), Cet. Ke-8, h. 6-7.

¹⁶ Muh. Said HM, *Pengantar Ekonomi Islam: Dasar-Dasar dan Pengembangannya*, (Pekanbaru: Susqa Press, 2008), Cet. Ke-8, h. 6-7.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan bagaimana penggalian dan implementasi sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan manusia, dimana penggalian itu harus sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah atau sesuai dengan syari'at Islam.
2. Ilmu ekonomi Islam adalah suatu amanah, yaitu amanah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah SWT dan kewajiban kepada sesama manusia.
3. Posisi ilmu ekonomi Islam merupakan cabang dari ilmu fiqih, maka ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syari'at aplikatif yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci tentang persoalan yang terkait dengan materi, membelanjakan dan cara-cara mengembangkan harta.
4. Hakikatnya ekonomi Islam sebagai kajian sejarah, empirik dan teori bagi menganalisis nilai Islam; atau merupakan ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan kehendak syari'at dari segi kebaikan diri serta kebaikan bersama secara kebendaan dan kerohanian demi mendapatkan keridhaan Allah SWT.

Menurut Muhammad Said ekonomi Islam dibangun di atas empat landasan filosofis, yaitu tauhid, keadilan dan keseimbangan, kebebasan dan pertanggung¹⁷. Empat landasan di atas merupakan dasar utama bagi seseorang dalam melakukan aktifitas ekonomi. Oleh karena itu, bila seseorang dalam melakukan aktifitas ekonomi khususnya dan senantiasa selalu berpedoman kepada empat landasan filosofis di atas, maka perbuatannya akan mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT.

¹⁷ *Ibid*, h. 11.

Menganalisis pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang sistem politik ekonomi Islam, dimana tidak terdapat pertentangan dengan konsep-konsep dasar dalam ekonomi Islam. Dalam membahas sistem politik ekonomi Islam, Taqiyuddin An-Nabhani terlebih dahulu mengkritisi konsep atau sistem politik ekonomi di luar Islam, yaitu sistem kapitalisme dan sosialisme. Sehingga dari komparasi yang dilakukan, terlihatlah keunggulan dari sistem politik ekonomi Islam dibandingkan sistem politik ekonomi yang ada di luar Islam.

Keunggulan sistem politik ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Taqiyuddin An-Nabhani, yaitu (1) Memecahkan masalah utama yang dihadapi setiap orang sebagai manusia yang hidup sesuai dengan interaksi-interaksi tertentu, (2) Mendorong setiap orang untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan (3) Mengupayakan kemakmuran bagi dirinya di dalam gaya hidup tertentu.¹⁸

1. Memecahkan masalah utama yang dihadapi setiap orang sebagai manusia yang hidup sesuai dengan interaksi-interaksi tertentu.

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani masalah utama atau pokok dalam ekonomi adalah tidak lancarnya distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Hal demikian mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau kebutuhan primer (*basec needs*) masyarakat itu sendiri. Adapun solusi yang ditawarkan adalah pemerataan distribusi kekayaan kepada masyarakat. Sehingga dengan meratanya distribusi kekayaan masalah utama yang dihadapi teratasi.¹⁹

¹⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizhamu al-Iqtishodi fi al-Islam*, Diterjemahkan oleh Hafiz Abdurrahman, dengan judul *Sistem Ekonomi Islam*, *op.cit*, h. 69-70.

¹⁹ *Ibid*, h. 28.

Pandangan tentang masalah utama dalam ekonomi menurut Taqiyuddin An-Nabhani berbeda dengan pandangan yang dikemukakan oleh Pemikiran Barat dalam melihat masalah tersebut, dimana Pemikir Barat melihat bahwa masalah utama dalam ekonomi bukanlah tidak meratanya pendistribusian kekayaan, akan tetapi rendahnya produksi barang dan jasa. Permasalahan tersebut terlihat dari uraian berikut:

- a. *What* : Barang atau jasa apa yang harus dihasilkan atau diproduksi dan berapa jumlahnya ?
- b. *How* : Bagaimana barang itu harus diproduksi ? Ini berhubungan dengan, kombinasi penggunaan faktor-faktor produksi yang harus dilakukan untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa tertentu.
- c. *For Whom* : Untuk siapa setelah barang itu diproduksi. Ini berhubungan dengan distribusi barang dan tergantung pula pada distribusi pendapatan.
- d. *When* : Kapan barang atau jasa itu harus dihasilkan. Hal ini berhubungan dengan ketepatan waktu produksi dan ketepatan barang harus sampai ke konsumen dengan waktu distribusi yang tepat waktu pula. Bagaimana mengadakan penjatahan terhadap penawaran barang.
- e. *Where* : Dimana barang dan jasa itu harus diproduksi. Ini menyangkut faktor lokasi yang optimal, baik dalam efisiensi produksi maupun efisiensi pemasaran, mampu melayani konsumen atau pemakai dengan jumlah dan kualitas yang tepat, tepat waktu, ketersediaan sumber-sumber ekonomi dibutuhkan untuk proses produksi maupun fasilitas pemasaran dengan prasarana perhubungan yang memadai.²⁰

Permasalahan utama dalam ekonomi di atas disebabkan oleh kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan Pemikir Barat adalah perlunya meningkatkan produksi barang dan jasa.

Dari uraian di atas terlihat jelas perbedaan antara pemikiran yang dikemukakan oleh Taqiyuddin An-Nabhani dengan Pemikir Barat dalam melihat masalah utama dalam ekonomi yang dihadapi masyarakat.

²⁰ Eka Syaikhrawati, *Diktat Mata Kuliah Ekonomi Mikro* (tidak diterbitkan), h. 2.

Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut mempengaruhi cara solusi atau tindakan yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang permasalahan utama dalam ekonomi tidak bertentangan dengan konsep ekonomi Islam. Karena, pada dasarnya kebutuhan manusia terbatas dan alat pemenuhan kebutuhan berlimpah (tidak terbatas). Bukti nyata dari terbatasnya kebutuhan, dapat diketahui dari kebutuhan seseorang terhadap air dalam kondisi haus atau dahaga. Sementara dihadapannya ada beberapa gelas air, maka ketika ia minum air pada gelas pertama, maka kebutuhannya sudah terpenuhi. Namun, ketika ia meminum air pada gelas selanjutnya akan berbeda ketika ia meminum air pada gelas pertama.

Adapun mengenai alat pemuas kebutuhan manusia pada dasarnya berlimpah dan tidak terbatas. Hal ini dapat dilihat dari berbagai firman Allah SWT , yang artinya:

[32] Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. [33] Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. [34] Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). (TQS. Ibrahim [14]: 32-34)

Firman Allah SWT, yang artinya:

Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan (TQS. Luqman [31]: 20)

Berdasarkan dalil di atas jelaslah bahwa alat pemuas kebutuhan manusia tidak ada batasnya. Karena Allah SWT telah menjamin dan mencukupi setiap kebutuhan itu untuk manusia. Dengan demikian, dalam perspektif ekonomi Islam pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tidak bertentangan dengan hukum syara', khususnya menilai masalah utama dalam ekonomi, yaitu tidak meratanya pendistribusian barang dan jasa, bukan masalah rendahnya produksi barang dan jasa.

2. Mendorong setiap orang untuk meningkatkan taraf hidupnya

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani bahwa dalam Islam Negara benar menjamin dan memastikan bahwa setiap warga Negara-nya mampu meraih dan merasakan kebahagiaan serta kesejahteraan, tidak hanya di dunia dan juga di akhirat, berbagai tahapan yang dilakukan, yaitu mewajibkan kepada laki-laki yang baligh untuk bekerja, sehingga bekerja merupakan aktivitas yang *fardhu* dan tidak boleh diabaikan.

Ketika dengan bekerja seorang (individu) juga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, maka Negara mewajibkan kepada kerabat atau ahli warisnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bila individu dan kerabat atau ahli waris juga tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka Negara akan menjamin kebutuhan tersebut dengan mengambil harta dari Baitul Maal.

Menurutnya, harta tersebut merupakan hak Negara yang diberikan Syara' untuk mengelolanya dari harta kepemilikan umum dan Negara. Kemudian dalam menjamin dan pengelolaan yang dilakukan Negara, dimana senantiasa menjadikan hukum Syara' sebagai pedoman atau dasarnya.

Sementara dalam pandangan Pemikir Barat hanya memberikan peluang sebesar mungkin kepada individu yang memiliki kemampuan materi (pemilik modal) untuk meningkatkan taraf hidupnya. Sementara masyarakat secara umum yang memiliki kemampuan materi (pemilik modal) tidak memperoleh peluang sedikit pun.

Cara pandang demikian dipengaruhi oleh pandangan tentang konsep kepemilikan. Dimana, dalam pandangan pemikir ekonom di luar Islam (kapitalisme dan sosialisme), yang hanya mengakui satu konsep kepemilikan. Ideologi kapitalisme hanya mengakui kepemilikan individu (*private property*), dan sosialisme juga demikian, hanya mengakui konsep kepemilikan Negara (*state property*).

Pandangan demikian berbeda dengan konsep kepemilikan dalam Islam, yaitu mengenal tiga bentuk kepemilikan, yaitu kepemilikan individu (*private property*), kepemilikan Negara (*state property*), dan kepemilikan umum (*collective property*). Dengan demikian, dalam perspektif ekonomi Islam mengukur sejahteranya ekonomi suatu Negara dilihat secara individu atau perorangan, bukan diukur melalui asumsi perhitungan yang dilihat dari pendapatan nasional atau GNP (*Gross National Product*).

3. Mengupayakan kemakmuran bagi dirinya di dalam gaya hidup tertentu

Menurut pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani, Islam memberikan peluang kepada setiap individu untuk meraih kemakmuran ekonomi setelah individu tersebut memiliki mampu memenuhi kebutuhan pokok/utama. Sementara dalam perspektif ekonomi di luar Islam (kapitalisme dan sosialisme) hanya memberikan peluang kepada individu yang memiliki kemampuan materi saja, tidak kepada setiap individu. Dengan demikian, menurut Taqiyuddin An-Nabhani dalam mengatasi persoalan ekonomi masyarakat menjadikan distribusi sebagaimana masalah utama selanjutnya produksi dan konsumsi. Berbeda dengan konsep ekonomi kapitalisme dan sosialisme menitikberatkan masalah ekonomi pada produksi, konsumsi dan distribusi.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa sistem politik ekonomi Islam telah dibangun dengan berpijak pada asas pemenuhan kebutuhan setiap orang sebagai individu yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu, serta asas bekerja untuk mendapatkan kekayaan dalam rangka memenuhi apa saja yang bisa memuaskan kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Karena pelaksanaan dari sistem politik ekonomi Islam pada hakikatnya akan menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan hukum syari'ah yang diterapkan oleh setiap orang dengan dorongan ketakwaan kepada Allah SWT serta dilaksanakan oleh Negara, melalui pembinaan dan pengundang-undangan hukum syariah. *Wallahu 'alam Bish-Showab.*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pengkajian dan analisis tentang pemikiran Taqiyuddin An-Nabani dan analisis ekonomi Islam tentang politik ekonomi Islam, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sistem politik ekonomi Islam menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani merupakan sistem politik yang unit dan khas dibandingkan dengan sistem ekonomi selain Islam. Dimana dalam sistem politik ekonominya, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani memaparkan tentang peran Negara begitu penting dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok (primer) setiap warga Negara tanpa terkecuali. Hal ini didasari bahwa pandangan politik ekonomi Islam, dalam mengukur terpenuhi atau tidaknya kebutuhan pokok seseorang dengan mengukur secara individu bukan secara kolektif. Kemudian, sistem politik ekonomi Islam memberikan kesempatan kepada individu untuk meraih kebutuhan sekunder, dan tersier sesuai kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki. Dengan cara mewajibkan laki-laki yang baligh untuk bekerja, bila dengan bekerja juga tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka dituntut kepada kerabat dan ahli warisnya. Namun, bila keduanya juga tidak mampu, maka Negara menjamin dengan mengambil dari Baitul Maal.

Dengan demikian, tampaklah bahwa politik ekonomi Islam telah dibangun dengan berpijak pada asas pemenuhan kebutuhan setiap orang sebagai individu yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu, serta asas bekerja untuk mendapatkan kekayaan dalam rangka memenuhi apa saja yang

bisa memuaskan kebutuhan. Karena itu, politik ekonomi Islam tersebut sebenarnya berdiri di atas satu konsep, yaitu menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan hukum syari'ah yang diterapkan oleh setiap orang dengan dorongan ketakwaan kepada Allah SWT serta dilaksanakan oleh Negara, melalui pembinaan dan pengundang-undangan hukum syariah.

B. Saran

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi Negara Indonesia secara umumnya, dimana dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya hendaknya menerapkan sistem politik ekonomi Islam sebagai solusi, bukan yang lainnya, menerapkan sistem ekonomi Kapitalisme atau Sosialisme. Dimana, sistem Politik Ekonomi Islam merupakan sistem politik ekonomi yang benar-benar menjadikan al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaannya. Diharapkan juga kepada mahasiswa dan dosen untuk mengkaji dan menganalisis dari keunikan pemikiran para ilmuwan-ilmuan di dalam Islam tentang konsep-konsep pemikiran di antaranya pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabani.

Selanjutnya, setelah mengkaji pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang Politik Ekonomi Islam, dimana pemikirannya dapat menjadi suatu tawaran solusi saat ini dalam mengatasi berbagai persoalan dalam bidang ekonomi, seperti pengetasan kemiskinan, pengelolaan aset-aset publik (*milk al-'am/ collective propherty*), dan berbagai permasalahan ekonomi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadim Zallum, *Political Thought (Afkar Siyasiyah)*, Diterjemahkan Abu Faiz, dengan judul *Pemikiran Politik Islam*, Bangil: Al-Izzah, 2004
- Abdurrahman al-Maliki, *as-Siayasah al-Iqtishadiyatu al-Mutsila* (terj), Ibnu Sholah dengan judul *Politik Ekonomi Islam*, Jawa Timur: al-Izzah, 2001
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya; Karya Abditama, 2001
- Endah Kartikasari, *Membangun Indonesia Tanpa Pajak dan Utang: Membedah APBN 2005-2010 VS APBN Khilafah*, Bogor: Al-Azhar Press, 2010
- Hafidz Abdurrahman, *Islam Politik dan Spiritual*, Jakarta: Wadi Press, 2002
- Herry Muhammad dkk, *Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani, 2006
- <http://penumpangjalananmultiplay.com/journal/item/16>
- <http://potret-pendidikan-indonesia.com//> diakses pada 2/3/12//
- <http://www.uccb.ns.ca/mchoudhu/ipe.htm>, diakses pada 2/3/12
- Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, Bogor: al-Azhar Press, 2009
- Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Khattab*, Diterjemahkan oleh Asmuni Sholehan Zamakhshari, dengan judul *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab*, Jakarta: KHALIFA-Pustaka Al-Kautsar Group, 2006
- M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru, Alaf Riau, 2007
- Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam: Dasar-Dasar Pengembangan*, Pekanbaru, Suska Press, 2008
- Puspo Widiastomo dalam <http://Ownerdeshion.com/> diakses pada 12 April 2012//
- Tahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1985

Taqiyuddin An-Nabhani, *al-Nizhaamu al-Iqtishodi fi al-Islam*, Beirut: Darul Ummah, 1425 H/ 2004 M

_____, *An-Nizhaamu Al-Islaam*, Diterjemahkan oleh Abu Amin, dkk dengan judul *Peraturan Hidup Dalam Islam*, Bogor: Al-Izzah, 2005

_____, *Sistem Ekonomi Islam*, Diterjemahkan oleh Hafiz Abdurrahman, dengan judul *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2010

Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Mengislamkan Ekonomi Masyarakat dan Memasyarakatkan Ekonomi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009